

LAMPIRAN

A. Kedaulatan Rakyat

1. Sabtu 2 mei 2015



Kedaulatan Rakyat
Sabtu Legi
Suara Hati Nurani Rakyat
Harian Pagi 32 Halaman
Harga Eceran Rp 3.000

KR GROUP
2 Mei 2015
13 Rejeb 1948 Tahun LXX No 209
<http://www.krjogja.com>
Terbit Sejak 27 September 1945

'Hapus' Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra

YOGYA (KR) Keputusan Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan Sabdaraja di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Kamis (30/4) pukul 10.00 WIB sempat mengundang sejumlah kalangan. Selain undangan mendadak, pisowanan yang dikhususkan bagi kalangan internal Kraton itu tertutup bagi media.

Berdasarkan data yang dihimpun KR dari berbagai sumber, Sabdaraja itu keris lima hal. Pertama, penyebutan buwono diubah menjadi buwono. Kedua, tidak lagi menggunakan gelar khalifatullah. Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan, serta keli-

ma yaitu menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Adik Sultan HB X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat membenarkan Sabdaraja berisi lima poin tersebut. "Saya tidak menghadiri pisowanan itu karena harus mengajar di Diklat. Tapi memang benar itu poin-poinnya (Sabdaraja)", ujar Gusti Yudha saat dihubungi wartawan, Jumat (1/5).

Gusti Yudha bersuara keris menanggapi Sabdaraja. Menurutnya, isi Sabdaraja yang dikeluarkan Sultan HB X telah menabrak tatanan Lima poin Sabdaraja itu adalah tatanan adat yang pokok, berlaku turun-temurun dan tidak bisa sembarangan diubah. (Poin-poin)

itu adat pokok yang turun-temurun, sudah menyatu dalam Kraton Yogyakarta. Kalau (tatanan) diubah, berarti bukan Kraton Yogyakarta lagi, tapi ada kraton baru yang dipimpin raja baru", tegasnya.

Pernyataan Gusti Yudha terutama mengacu dihapuskannya gelar Khalifatullah, serta perubahan sebutan Buwono menjadi Buwono. Perubahan itu, lanjutnya, berdampak pada banyak hal, termasuk perjanjian antara Kraton Yogyakarta dengan NKRI (di era Sultan HB IX). "Kraton Yogyakarta punya tatanan dan paugeran seperti yang selama ini berlaku turun-temurun. Jika diubah, institusinya bukan lagi Kraton Yogyakarta dan itu punya risiko besar", tandasnya.

Saat membacakan Sabdaraja tersebut selain permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Sultan juga didampingi putri-putrinya, termasuk GKR Pembayun. Sementara untuk beberapa adiknya seperti Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabakusumo dan GBPH Yudhaningrat justru tidak hadir.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Isi Sabdaraja

- 1 Penyebutan buwono diubah menjadi buwono.
- 2 Tidak lagi menggunakan gelar khalifatullah.
- 3 Penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh.
- 4 Mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan
- 5 Menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Dari berbagai sumber
Grafis JQS

Sabdaraja

Sambungan hal 1

dalam pisowanan tersebut karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.

Ditemui ketika membuka Pekan Olahraga dan Seni Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Porseni BPDSI) XI 2015, Jumat (1/5) kemarin, Sultan enggan bicara banyak. Sultan pun terlihat enggan diajak bicara soal Sabdaraja yang mendadak ia keluarkan. *KR* hanya bisa meminta konfirmasi dengannya selama satu menit sebelum masuk mobil dan meninggalkan lokasi. "*Kowe kok ngerti, saya nggak mau komentar dulu,*" katanya singkat.

Sultan beralasan, hal tersebut bukanlah konsumsi pers. Sabdaraja adalah konsumsi internal Kraton dan ia akan lebih dahulu lapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Karena itu internal, saya akan lapor ke kementerian dalam negeri

dan sebagainya bukan untuk pers," sambung Sultan.

Setelahnya, Sultan pun enggan menjawab, termasuk soal makna Sabdaraja yang ia keluarkan. "Ya sudah nanti, nanti saya lapor dulu," tuturnya..

Adik Raja Kraton Yogyakarta, GBPH Prabukusumo mengakui dirinya sengaja tidak hadir dalam acara Sabdaraja yang digelar di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Kamis (30/4) lalu. Dirinya juga meminta maaf kepada awak media tidak bisa memberitahu isi dari Sabdaraja tersebut mengingat sangat sensitif sekali dan khusus bagi kalangan internal Kraton Yogyakarta semata.

"Saya memutuskan tidak hadir karena acaranya tidak jelas apa, daripada seperti kejadian pada saat Sabdatama. Saya di-

tuduh setuju dengan Sabdatama tersebut dan kelihatan sangat pro di berbagai tayangan televisi. Saya juga dituduh tahu isinya dulu sebelum dibacakan, artinya saya tidak bermoral *dong*, aturannya tidak boleh ajudan baca dulu apa yang dibaca atasannya," ungkap Ketua KONI DIY tersebut.

Lain halnya dengan adik kandung Sultan HB X, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto yang ikut hadir dan menyaksikan sabdaraja tersebut mengaku belum mengetahui maksudnya dengan persis. "Saya belum tahu maksudnya karena perlu baca lagi, maklum saya sudah berumur jadi harus membacanya lagi. Nanti biar ada keterangan resmi dari kraton tentang hal ini," tandasnya.

(Bro/Ria/M-3*/-2)-b

2. minggu 3 mei 2015

JELASKAN SABDARAJA

Besok, Sultan Kirim Surat ke Mendagri

YOGYA (KR) - Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan pemberitahuan tentang adanya Sabdaraja yang didalamnya memuat penjelasan tentang perubahan nama dirinya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rencananya surat pemberitahuan dari Kraton Yogyakarta akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Senin (4/5) besok. Selain itu surat pemberitahuan rencananya juga akan dikirim ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

"Kemungkinan Senin (4/5) besok surat pemberitahuan itu akan kami kirimkan ke Kemendagri dan Pemda DIY yang sifatnya pemberitahuan," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (2/5).



KR-Riyana

Sultan HB X

Ketika dimintai komentar apakah surat pemberitahuan tersebut mengarah pada kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keistimewaan (UUK), Raja Kraton Yogyakarta itu lebih memilih untuk tidak banyak berko-

mentar. Karena pihaknya menyerahkan kepada pemerintah pusat.

"Secara resmi institusi pemerintah harus tetap diberitahu. Soal hasilnya nanti seperti apa saya tidak tahu, terserah pemerintah pusat

saja. Begitu pula soal detailnya seperti apa, nanti kalian bisa melihat sendiri," ujar Sultan.

Komentar serupa dikemukakan oleh menantu Sri Sultan Hamengku Buwono X, KRT Purbodiningrat. Menurutnya, rencananya minggu depan dari pihak Kraton akan melakukan keterangan pers tentang Sabdaraja, supaya masyarakat benar-benar mengerti secara utuh. Karena Sabdaraja yang saat ini sudah beredar di masyarakat hanya penggalan-penggalan semata. Untuk itu pada saatnya nanti Kraton akan menyampaikan secara detail.

"Karena yang beredar sifatnya hanya penggalan-penggalan dan tidak secara utuh, jadi sifatnya agak bias. Sebaiknya masyarakat tidak perlu bingung, karena pada waktunya nanti akan kami jelaskan," ujar Purbodiningrat.

*** Bersambung hal 10 kol 5**

dan 29 deriken yang mem...

Besok,

Menurut suami dari GKR Maduretno tersebut, sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat, kraton akan melakukan musyawarah berkaitan dengan hal itu. Walaupun sebenarnya Sabdaraja sepenuhnya merupakan hak *ngarsa dalem*, namun kraton akan tetap melapor ke pemerintah pusat.

"Detailnya nanti akan dikaji bersama. Karena ada perubahan dalam internal kraton harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Soal muncul pro kontra adalah hal biasa terlebih adanya peran media, sehingga orang bebas beropini untuk memberikan komentar," terangnya.

Terpisah, putri kedua Sultan HB X, GKR Condrokrono saat dikonfirmasi *KR* juga belum bisa memberikan keterangan. Senada dengan ayahandanya yang tidak ingin berkomentar karena Sabdaraja memang terkait perubahan internal di Kraton Yogyakarta sehingga bukan konsumsi publik.

"Maaf saya belum bisa berkomentar dulu terkait Sabdaraja tersebut, *maturnuwun*," katanya.

Sementara itu Guru Besar Sejarah UGM, Prof Dr Djoko Suryo menjelaskan, adanya pro dan kontra yang terjadi di kalangan internal maupun eksternal Kraton Yogyakarta pasca Sabdaraja masih dalam batas kewajaran.

Sabdaraja itu sudah masalah internal Kraton Yogyakarta dan lingkup dalam. Apapun isinya itu sudah wewenang seorang raja untuk memberikan sabda yang dalam hal ini sangat berhubungan dengan masalah keluarga dan kraton," ujarnya.

Djoko melihat Sabdaraja ini sudah wilayah atau ranah di internal Kraton Yogyakarta sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh pihak luar termasuk pemerintah pusat. Semua orang yang ada di luar lingkup kraton tidak bisa mencampuri dan tidak ada hubungannya dengan urusan tersebut. Dalam sebuah sistem kerajaan monarki seperti Kraton Yogyakarta, maka apabila seorang raja telah memberikan keputusan atau titah apapun itu harus dilakukakan.

"Sabdaraja itu sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat karena sistemnya monarki mengikat ke dalam dan tidak bisa dicampuri dari luar," tandas Djoko.

Menurutnya poin-poin yang disebutkan dalam Sabdaraja, apabila ada perubahan terkait dengan Perdais tentunya akan dikomunikasikan dengan pusat. Disini yang harus dioroti memang tidak hanya internal kraton semata, namun hubungan kraton dengan pemerintah pusat berkaitan dengan otonomi daerah dan Keistimewaan DIY.

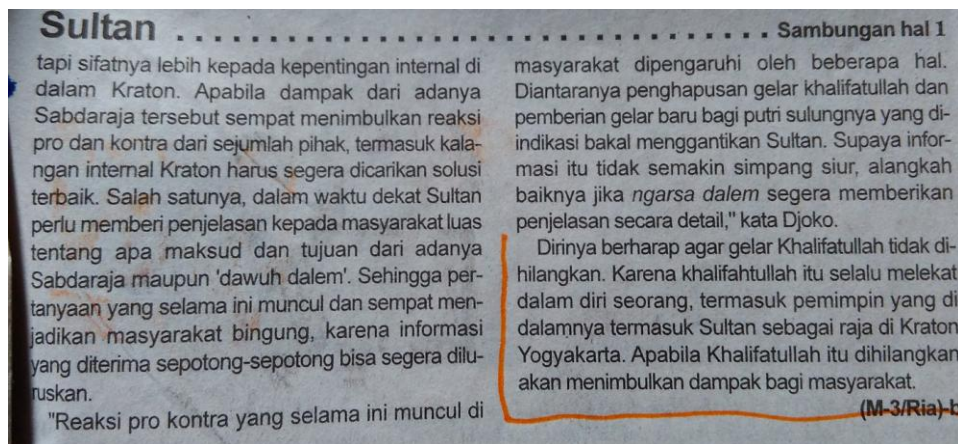
"Ada tingkatan-tingkatan disini seperti hak raja dalam monarki, hak raja sebagai gubernur dan lain-lain. Itu lingkupnya masih internal kraton terkait hak Sultan HB X sebagai raja, kalau pusat tinggal menyesuaikan dan tidak bisa mencampuri urusan keluarga kraton. Pemerintah hanya sebatas hubungan siapa sebagai gubernur yang diajukan kraton, soal di dalam kraton tidak memiliki wewenang apapun," ujarnya.

Menurut Djoko, terkait penyelesaian pro-kontra Sabdaraja tersebut juga dikembalikan kepada keluarga atau internal kraton. Pro-kontra sudah biasa terjadi dalam lingkup kraton, penyelesaiannya sangat tergantung pada keluarga tersebut dalam mengelola permasalahan yang ada.

"Kalangan internal kraton bisa pecah bisa tidak tergantung cara penanganan dalam keluarga kraton itu sendiri. Apabila pemecahan bisa diterima dan disepakati maka bisa rukun kembali," imbuh Djoko.

(Ria M S)

3. Selasa 5 mei 2015



4. Rabu 6 mei 2015

Sultan 2 Menit Meditasi Sebelum Sabdaraja

GKR Pembayun Jadi GKR Mangkubumi

YOGYA (KR) - Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X kesembili mengahliarkan Sabdaraja pada Selasa Wage (5/5) di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta. Sabdaraja kali ini dikeluarkan bersamaan sefont HB X yang jatuh pada Selasa Wage, berisi pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi Putri Mahkota yang kemudian namanya berubah menjadi GKR Mangkubumi.

Seperti Sabdaraja sebelumnya, kali ini juga digelar bertatap bagi media, sehingga banyak pers abdi dalem serta kalangan internal Kraton dan Para Pankualaman yang bisa masuk di Siti Hinggil.

Berdasarkan keterangan yang dihipungin KR, prosesi Sabdaraja dimulai pukul 10.40. Seperti Sabdaraja sebelumnya, kali ini Sultan juga menggunakan pakaian kebesaran seorang raja atau biasa disebut busana keprabon. Salah satu ciri-ciri dari busana keprabon itu adalah memakai kulak biru (wakidan biru) dengan sumping walpati. Hal semacam ini dilakukan oleh GKR Hemas yang menggunakan busana seorang permaisuri, persis seperti susana 7 Maret 1989 saat Sultan naik tahta. Adapun semua putri Sultan mengenakan kebaya berwarna biru.

Sebelum mengucapkan Sabdaraja, Sultan sempat melakukan meditasi selama 2 menit. Dengan posisi duduk di dmpar kenanga, Sultan menyimpulkan Sabdaraja dalam waktu bergolong cukup singkat. Karena Sultan harus berahli di Siti Hinggil, sekitar 15 menit sebelum 11.08 WIB Sultan terlihat keluar dari Siti Hinggil dan langsung masuk ke mobil.

Berdasarkan keterangan salah satu abdi dalem, Raden Wedana Ngabdul Sadak Sabdaraja yang berlangsung singkat tersebut berisi satu poin. Adapun isinya adalah perubahan nama putri sulunginya.

GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Meski banyak yang menafikan, penggantian nama * Bersambung hal 7 kol 1

GKR Pembayun

menjadi GKR Mangkubumi ini merupakan penobatan putri mahkota atau calon penerus tahta Kraton Yogyakarta, namun abdi dalem yang biasa bertugas di Masjid Panepen ini mengaku tidak tahu secara persis. Namun berdasarkan informasi yang diterima KR, Sabdaraja kali ini berisi satu poin yakni perubahan nama GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.

Terkait dengan gelar tersebut, secara terpisah budayawan M Jazir AS menjelaskan, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi artinya calon raja, Hamemayu Hayuning Bawono artinya bertugas memakmurkan dan mensejahterakan dunia, Langgeng ing Mataram artinya Abadi untuk dinasti Mataram

Adik Raja Kraton Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo bersama adik-adiknya yang lain memang sepakat dan berjanji tidak menghadiri Sabdaraja yang kedua kalinya di gelar di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Selasa (5/5). Ketidakhadiran meskipun telah menerima undangan tersebut sengage dilakukan mengingat baik dirinya maupun adik-adiknya masih menyesalkan dan menyayangkan Sabdaraja pertama yang menghilangkan kata 'Khalifatullah' dan membacanya dengan 'Assalamualaikum'.

Pengageng Pawedan Hageng Puno-kawan Kraton Yogyakarta ini sudah meminta diadakan rapat keluarga pada Rabu (6/5) untuk membicarakan hal tersebut. Gusti Prabu juga sekaligus meminta dan mengajak masyarakat DIY untuk mengingatkan Sultan HB X. (Ria/M-1/M-3)-d

Sambungan hal 1

5. Sultan bantah Isi Sabda Raja

Sultan Bantah Isi Sabdaraja

WONOSARI (KR) - Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X memberikan pernyataan mengemukakan terkait isi atau poin Sabdaraja yang beredar. Menurut Sultan, lima poin Sabdaraja yang beredar di media massa salah semuanya. Sultan juga menyayangkan sikap adik-adiknya terkait isi Sabdaraja sehingga menyebabkan polemik semakin meluas. "Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 hal tersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik-adik yang membuat polemik makin rnehaas," kata Sri Sultan HB X usai penanaman pohon ryangting di KPH Cokrokrubuh, Getas, Playen, Kamis (7/5).

Sultan mengungkapkan, komentar adik-adik terkait Sabdaraja sangat disayangkan. Padahal adik-adik tersebut tidak mengikuti penguapan Sabdaraja yang sudah dilakukan 2 kali. Sehingga tidak mengetahui isi Sabdaraja secara benar. Sebaiknya berpikir tidak menggunakan diri (menunjuk kepala), namun menggunakan ini (memegang dada). Bila dibaca dengan ini (pikiran) mesti keliru, sehingga harus dengan ini (hati). "Dalam falsafah Jawa, membaca situasi tidak menggunakan pikiran namun perasaan," ujarnya.

Sultan juga sudah memprediksi akan terjadi pro-kontra terkait dengan Sabdaraja. Bila ada masyarakat yang akan meminta penjelasan, dipertilakan. Berbeda pendapat merupakan hal biasa.

Ditegaskan pula bahwa Sultan tidak punya dukun, karena licara spiritual sudah dilakukan sejak zaman dulu. "Sudah sejak zaman dulu, saya yang biasa melakukan ziarah ke makam, termasuk berbicara tentang spiritual," jelasnya.

Sultan kembali mengungkapkan rencana memberikan keterangan pers secara resmi kepada wartawan pekan depan.

Namun demikian, *Raiy Dalem GBPH* Yudhaningrat mengeritik pernyataan Sultan HB X bahwa lima poin Sabdaraja yang dikutip media massa salah semua.

Gusti Yudha meyakini poin-poin yang dikutip media benar, serta meminta agar Sultan tidak mengabaikan pernyataan yang menyinggung masyarakat.

Gusti Yudha mengakui dirinya tidak hadir saat Sabdaraja pertama dibacakan Sultan pada Kamis (30/4) pekan lalu. Namun ia mendapat keterangan tentang isi Sabdaraja dari Raiy Dalem KQPH Hadisriwoto yang menghadiri acara Sabdaraja tersebut. "Lainya (Sabdaraja) memang seperti yang dimuat di media,"

Sambungan hal 8 kol 7

.. **Sambungan hal 1**
enerima pengembalian tersebut
a surat kekancingan tersebut,
lalem termasuk gelar, honor ju-
h dahulu pada yang bersang-
an kekancingan tersebut, dan
mbalian kekancingan adalah
' tutur GBPH Cokrodingrat.
Kardi SH yang pertama kali
raton Ngayogyakarta pasca
(*-2/Ria)-a

Sultan
Sambungan hal 1
antara lain menghilangkan ge-
lar Khalifatullah, mengganti
sebutan Buwono menjadi Ba-
wono," katanya. Dengan per-
nyataan Sultan media salah
mengutip isi Sabdaraja, Gusti
Yudha menilai Sultan justru
berupaya melempar kesalahan
ke pihak lain. (Ded/Bro/Ria)-d

6. Sabtu 9 mei 2015

Menjaga Eksistensi Kraton

Sabdaraja untuk Perubahan Zaman



KR-Franz Boedisoekama

Sultan HB X menjelaskan kembali Sabdaraja dan Dhawuhraja didampingi GKR Hemas di Ndalem Wironegaran Kompleks Kraton Yogyakarta, Jumat (8/5).

YOGYA (KR) - Sri Sultan HB X menegaskan keluarga Sabdaraja tanggal 1 Mei 2015, dukuti Dhawuhraja tanggal 6 Mei 2015 merupakan langkah Kraton untuk menghadapi perubahan zaman. Untuk menjaga eksistensi Kraton saat ini dan masa mendatang harus dapat menyesuaikan dengan perubahan. Penjelasan Sultan tersebut disampaikan kepada masyarakat di kediaman GKR Mangkubumi ndalem Wironegaran Penembahan Yogyakarta, Jumat (8/5). Menurut Sukeluarnya Sabdaraja dan

*** Bersambung hal 7**

YOGYA **Mendampingi Pakan Tantu Naik Tak**

Sabdaraja

Sambungan hal 1

Dhawuhraja merupakan pentunjuk dari Allah SWT dan para leluhur yang merupakan jawaban atas tantangan Kraton ke depan.

Meski demikian, Sultan mengakui bahwa langkah ini tidak sependapat dengan adik-adiknya. Sultan mengaku sudah mencoba membangun komunikasi dan berusaha memberikan penjelasan terkait dengan isi dari Sabdaraja dan Dhawuhraja. Termasuk bagi adik-adiknya yang tinggal di Jakarta. Bahkan adik-adiknya di Jakarta dianggapnya cenderung bersikap netral, kemarin sudah datang ke Kraton Kilen untuk meminta penjelasan.

"Adik-adik dari Jakarta kemarin sudah bertemu dengan saya untuk minta penjelasan. Semua isi dari Sabdaraja dan Dawuhraja sudah saya jelaskan kepada mereka secara detail. Mereka mengaku sudah ditunggu *kangmas-kangmas* (adik-adik di Yogya) dan mereka akan berusaha untuk menjelaskan. Seandainya tidak mampu menjelaskan dengan baik mereka siap menjembatani supaya bisa bertemu dengan saya," jelas Sultan.

Sultan menyadari keputusan yang diambilnya memiliki risiko, baik dari internal kraton maupun pihak luar. Jadi dirinya bisa memahami, jika ada adik-adiknya yang kontra. Namun sebagai seorang Raja di Kraton Yogyakarta dirinya harus tetap melaksanakan. Karena jika seorang Raja tidak melaksanakan tugas, risiko siksanya lebih berat dibandingkan orang lain. Sebaliknya apabila *mancai* (tidak percaya) bakal *hancur lebur*.

Dijelaskan pula, Sabdaraja tidak menggunakan Assalamualaikum bukan berarti di Kraton Yogyakarta tidak boleh menggunakan Assalamualaikum. Tapi dirinya merasa bahwa Sabdaraja adalah *dhawuh Allah* lewat para leluhur. Karena perintah kalau perintah dari Allah tidak menggunakan Assalamualaikum.

"Saat mengucapkan Sabdaraja saya tidak menggunakan Assalamualaikum, karena perintah langsung dari Allah. Tapi bukan berarti di Kraton Yogyakarta ti-

dak diperbolehkan menggunakan Assalamualaikum," ungkap Sultan.

Sultan menjelaskan, Sabdaraja dan Dhawuhraja, selama ini memang dilakukan secara mendadak. Tapi karena semua itu merupakan perintah para leluhur, dirinya berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menggerutu. Konsekuensi dari semua itu, komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk *rayi dalem* dilakukan lewat telpon dan SMS, karena tidak mungkin untuk menyebar undangan.

Setiap mau membacakan Sabdaraja dan Dhawuhraja, dirinya selalu mengundang kerabat kraton dan *rayi-rayi dalem*. Walaupun karena sesuatu hal mereka tidak bisa hadir, namun sudah berusaha mengundang dan memberitahu.

"Semua adik-adik selalu saya undang baik saat mau membacakan Sabdaraja maupun Dhawuhraja," ujar Sultan.

Dalam kesempatan itu Sultan membatah informasi yang berkembang bahwa memiliki dukun. "*Saya tidak punya guru, tidak punya dukun. Tapi kalau juru kunci ada...*", ujarnya.

Sementara itu Sosiolog dari UNY Sugeng Bayu Wahyono mengatakan, dirinya berharap adanya perbedaan yang terjadi di Kraton segera berakhir karena masyarakat mengharapkan *tata titi tentrem*. Menurutnya, Sabdaraja dan Dhawuhraja konteksnya tergolong cukup tinggi, sayangnya tidak setiap orang bisa memahami. Hal itu yang bisa menyebabkan adanya perbedaan pemahaman. Hal itu terjadi, karena poin paling penting yang tidak dipahami. Padahal posisi Kraton Yogyakarta itu, tidak bersifat statis tapi mengikuti perkembangan zaman. Jadi pemahaman Kraton Yogyakarta tidak esensialistik. Secara esensialistik tidak pernah ada yang namanya Ratu, tetapi pesan yang disampaikan Sultan, Kraton Yogyakarta selalu terbuka terhadap adanya perubahan politik yang terjadi pada saat itu.

(Ria/Fsy/-5)-b

7. Minggu 10 mei 2015

<http://www.krjogja.com>

terbit Sejak 27 September 1945



11 'Rayi Dalem' Sepakat Selamatkan Kraton Yogya

YOGYA (KR) - Sebelas *rayi dalem* (adik) Sri Sultan Hamengku Buwono X telah sepakat berjuang menyadarkannya, demi menyelamatkan Kraton Yogyakarta. Menurut mereka, apabila Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi atau GKR Pembayun dipaksakan sebagai putri mahkota yang selanjutnya akan menempati tahta Kraton Yogyakarta, sangat berbahaya karena mazhabnya tidak ada dalam kekhalfahan Mataram Islam.

"Kami bersebelas, *rayi dalem* Sultan HB X sudah menyiapkan jawaban-jawaban kepada beliau, dengan juru bicara KGPH Hadiwinoto. Intinya, apa yang diucapkan Sultan HB X dalam Sabdaraja itu cacat hukum dan batal hukum karena tidak sesuai dengan pugeran pokok yang sudah ada. Seperti kereta api keluar dari rel, padahal kami ada dan menumpang di dalamnya," kata salah satu adik Sultan HB X, Gusti Bendero Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat, Sabtu (9/5).

Sebelas *rayi dalem* Sultan HB X tersebut adalah KGPH Hadiwinoto, GBPH Hadiwuryo, GBPH Prabukusumo, GBPH Pakuningrat, GBPH Yudhaningrat, GBPH Condrodiningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryometaram, GBPH Hadinegoro dan GBPH Suryonegoro.

Untuk itu, para *rayi dalem* tersebut akan menempuh langkah menyadarkan Sultan HB X

* Bersambung hal 8 kol 1

Soal

Dhawuhraja," kata Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Djoko Dwiyanto kepada KR, Minggu (10/5).

Djoko mengatakan, antisipasi itu perlu dilakukan, supaya sikap pro dan kontra yang muncul pasca dikeluarkannya, Sabdaraja dan Dhawuh tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Pasalnya meski, Sabdaraja dan Dhawuhraja, sifatnya cenderung internal, tapi tidak bisa dipungkiri berdampak keluar. Misalnya berkaitan dengan Undang-undang Keistimewaan (UUK), Perdais bahkan pencairan Darta.

"Prinsipnya saya bisa memahami adanya reaksi pro dan kontra di masyarakat. Kendati demikian, saya tetap berharap polemik ini bisa segera diselesaikan. Karena bagaimanapun juga keistimewaan DIY harus tetap dijaga," terang Djoko.

Sebagai Ketua Dewan Kebudayaan DIY, dirinya hanya bisa berharap agar semua pihak bisa menyikapi persoalan secara arif dan bijaksana. Sehingga bisa tercipta suasana yang kondusif dan nyaman dikalangan masyarakat.

"Saya berharap semua pihak bisa bersikap bijaksana dan berpikir positif. Mudah-mudahan dengan cara itu, polemik yang ada bisa segera diselesaikan," tandasnya.

Terpisah Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) H Jatiningrat SH atau disapa Romo Tirun menegaskan dalam kelembagaan Kraton Yogyakarta khususnya administrasi, pihaknya masih memakai nama Sri Sultan Hamengku Buwono X belum diganti menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam urusan surat kedinasan kraton. Sebelum ada surat resmi dan pemberitahuan pergantian nama tersebut maka masih tetap memakai nama Buwono, termasuk pemakaian di masyarakat.

"Semua harus ditindaklanjuti apabila ada pergantian nama harus diberitahukan, diumumkan ke semua instansi di tingkat daerah hingga pusat dan masyarakat. Selama belum diumumkan resmi dengan dhawuh dalem lagi, belum boleh diganti administrasinya termasuk perubahan dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) se-

Sambungan hal 1

bagai pugeran negara," tutur Romo Tirun.

Humas Kraton Yogyakarta ini juga memperlihatkan surat-surat kedinasan di Kraton pasca disampaikannya sabdaraja beberapa waktu lalu hingga saat ini masih memakai nama terang dan di tanda tangani menggunakan nama Hamengku Buwono X. Mengingat sabdaraja terkait perubahan nama tersebut masih bersifat internal kalangan kraton, maka diperlukan proses untuk membuat surat-surat kedinasan yang memakai nama baru **Bawono**, termasuk surat-surat yang membutuhkan pengesahan dan tanda tangan dari beliau sebagai Gubernur DIY di Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

"Semua masih memakai nama Hamengku Buwono X sampai saat ini, belum diubah sama sekali. Seharusnya masih memakai Buwono sekarang, karena beliau belum mengumumkan secara resmi dihadapan publik maupun membenarkan surat perubahan nama, yang sah masih Buwono belum Bawono," tandasnya.

(RiaM-3)-a

8. Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK



KH. Andriana Makulana Surya

Warga Solo mengusung bingkai bertajuk Yogya Rukun Agawe Santosa saat Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo, Minggu (10/5). Dalam aksi itu mereka mendukung warga Yogya untuk tetap rukun dalam menyikapi konflik internal Kraton Yogyakarta.

Gubernur Diminta Mengantisipasinya

Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK

YOGYA (KR)—Meski Sabdaraja dan Dhawuhraja yang dikeluarkan oleh Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X, sifatnya lebih dipertentukkan bagi kalangan internal

Namun demikian, memiliki dampak hingga keluar kraton, yakni masyarakat luas tidak bisa dihindari. Antisipasi perlu dilakukan menghindari hal-hal yang tidak di-

inginkan.

Pasca Sultan memberikan penjelasan di nDalem Wiranogaran, kami langsung mengadakan pertemuan. Adapun hasil dari pertemuan itu

adalah meminta Gubernur DIY untuk mengantisipasi, terhadap kemungkinan yang timbul pasca dikeluarkannya Sabdaraja dan

** Bersambung hal 7 kol 1*

9. Sultan : Sabdaraja Itu Mutlak



Ada Kepentingan Dalam Polemik Kraton

Sultan: Sabdaraja Itu Mutlak

YOGYA (KR) - Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X memasukkan surat penjelasan Sabdaraja akan segera dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Sebelum dikirim nanti dirapatkan dulu apa kalimatnya, betul-t."

dipelakan secara tertulis saya tidak mau karena tidak mudah secara tertulis, karena harus langsung," tandasnya.

Menanggapi penolakan Sabdaraja maupun Dhawuhraja dari 11 adik-adiknya, Sultan HB X masih menyangkan apakah betul seluruh adik-adiknya tersebut tidak sependapat. Pasalnya, ada beberapa adik-adiknya yang berdomisili di Jakarta justru telah bertemu dengannya, sementara adik-adik yang berdomisili di Yogyakarta justru belum bertemu dengannya.

Dalam kesempatan itu Sultan meluruskan informasi bahwa telah bertemu dengan adiknya, GBPH Prabokusumo (105). Ditanyakan, GBPH Prabokusumo belum pernah bertemu dengan HB X.

Terlebih mengenai permintaan royalti dalam peraturan mendatalkan demi hukum Sabdaraja maupun Dhawuhraja, Sultan justru bertanya balik, "Batal demi hukum itu apa? Ini aturan kraton bukan undang-undang atau konstitusi republik. Jadi demi hukum yang mana? Misalkan ada tradisi itu hukum yang mana bisa membatalkannya. Sultan itu kan mutlak," imbuhnya.

Dengan demikian Sabdaraja dari Sultan itu mutlak.

Terkait upaya meredakan konflik internal Kraton, Pangayuhan Dukuh (Pandu)

Bantul menghargakan keadaan bisa kembali seperti biasa. Keluarga Kraton mempunyai kapasitas lebih untuk menyelesaikan polemik Sabdaraja secara internal. Selanjutnya, masyarakat tidak perlu terpancing serta terbelah untuk saling mendukung-mentukung kubu Kraton yang terpecah belah.

"Urusan Kraton diselesaikan dengan tata kelola di Kraton secara internal dan melibatkan keluarga besar Kraton Ngarayogyakarta, bukan orang lain di luar dari Kraton Surakarta sekalipun," ujar Ketua Paruh Bantu Sulisty Atmaja.

Pandu berharap masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan, ketentraman dan kerukunan warga serta berkomitmen dan tidak mudah terprovokasi oleh langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab. "Pandu turun berdo'a agar polemik ini cepat berakhir," pungkas Sulisty.

(M-3A)10-d

B. Harian Jogja

1. Sabtu 2 mei 2015

▶ KRATON

Sultan Dinilai Tabrak Adat

Sabda Raja Sri Sultan HB X

Kembali (30/4)

- Perubahan Buwono akan diubah menjadi di Buwono
- Tidak lagi menggunakan gelar Mataram
- Penyebutan kaping sedasa diganti Kaping sepuluh
- Akan mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pamanahan
- HB X akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ayoza Joko Piturun

JOGJA—Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga menjabat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja, Kamis (30/4) di Siti Hinggij, Kompleks Kraton. Namun, kerabat Kraton menilai isi Sabdorjo menunjukkan Sultan telah keluar dari adat dan paugeran Kraton.

Ujang Hasanudin
ujang@harianjogja.com

Menurut informasi, ada lima poin yang diucapkan Sultan dalam Sabda Raja. Yakni, perubahan gelar Buwono menjadi Bawana. Selain itu, dalam gelar Kasultanan tidak lagi menggunakan Khalifatullah.

Penyebutan Kaping Sedasa diubah menjadi Kaping Sepuluh. Selanjutnya, Sultan akan mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring. Terakhir, Sultan akan menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Prosesi adat Sabdorjo ini dihadiri sejumlah kraton, sentono dalem, dan abdi dalem. Di antaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)

▶ Gusti Yudho mengatakan perubahan gelar Sultan bisa mengubah semua tatanan

▶ Prabukusumo menyatakan sengaja tidak hadir dalam acara adat Sabda Raja dengan alasan acara tidak jelas

dho, merupakan penghormatan untuk Raja Kraton yang mulia, karena sedasa adalah bahasa Jawa inggil. Orang Jogja tidak sampai hati menyebut Sultan Hamengku Buwono dengan yang kesepuluh karena klausul sepuluh dinilai kasar (ngakal).

Gusti Yudho menegaskan tidak ada maksud untuk menentang raja, namun hanya menyampaikan informasi bahwa perubahan

Di antaranya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto. Sementara Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat tidak hadir.

Namun, GBPH Yudhaningrat membenarkan lima poin Sabdorjo yang diungkapkan Sultan. Pria yang akrab disapa Gusti Yudho ini mengatakan perubahan gelar Sultan bisa mengubah semuanya, bahkan lebih jauh bisa mengubah perjanjian Kraton dengan NKRI.

Menurut dia, gelar Sultan sudah menyatu dan gelar itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Keistimewaan DIY No.13/2014. "Gelar dan jeneng menyatu enggak bisa pisah-pisah," kata Gusti Yudho saat dihubungi Jumat (1/5) siang.

Gelar Sultan adalah Ngarsa Dalem Sameyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.

Perubahan perjanjian pendiri Mataram Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring diakui Gusti Yudho merupakan simbol kerajaan Islam yang sudah menyatu. "[Kalau berubah] berarti ada Kraton baru yang dipimpin raja baru," ucap dia.

Klausul sedasa pun, sambung Gusti Yudho, merupakan penghormatan untuk Raja Kraton yang mulia, karena sedasa adalah bahasa Jawa inggil. Orang Jogja tidak sampai hati menyebut Sultan Hamengku Buwono dengan yang kesepuluh karena klausul sepuluh dinilai kasar (ngakal).

Gusti Yudho menegaskan tidak ada maksud untuk menentang raja, namun hanya menyampaikan informasi bahwa perubahan

yang akan dilakukan Sultan penuh risiko karena sudah menabrak tatanan adat. "Yang ditabrak adat pokok," tegas dia.

Sementara itu, Prabukusumo menyatakan sengaja tidak hadir dalam acara adat Sabda Raja dengan alasan acaranya tidak jelas. Ia menolak mengomentari isi Sabda Raja, namun membiarkan masyarakat menanggapi.

Ketua Dewan Kebudayaan DIY Ahmad Charis Zubair mengungkapkan gelar Sultan bukan hanya sekadar gelar formalitas melainkan diwujudkan dalam gelaran amal. Menurut dia, perubahan gelar seharusnya juga menjelaskan makna simbolik dari perubahan tersebut. "Secara pribadi saya keberatan perubahan gelar [Sultan]," katanya.

Menurut, Charis Zubair memang Sabda Raja merupakan sabda pandita ratu, kewenangan raja yang bertahta, tak bisa dibantah. Namun, tentu di atas itu ada konstitusi (paugeran). Ia meyakini ada mata rantai peristiwa yang tak bisa lepas dari kondisi Jogja akhir-akhir ini sehingga Sultan mengeluarkan Sabda Raja. Dosen Ilmu Politik UGM Bayu Dardias mengatakan perubahan gelar memiliki efek cukup luas. Salah satunya, Undang-undang Keistimewaan bisa diamandemen sesuai dengan Sabda Raja.

2. Senin 4 mei 2015

Dewan menilai perubahan gelar Sultan berimplikasi terhadap perubahan naskah Undang-undang Keistimewaan DIY	<p>UUK tepatnya di Pasal kesatu nomor empat. Dipertahankannya gelar itu, jelas Inung-sapaan akrab Arif Noor Hartanto, sebagai penghormatan negara terhadap adat istiadat DIY dan Kasultanan yang sudah turun temurun sejak ratusan tahun lalu. "Menghilangkan kata Khilafah berarti mengubah nomenklatur yang ada dalam UU Keistimewaan," kata Inung, saat dihubungi, Minggu (3/5).</p>	<p>Inung, Gubernur dan Pemda DIY menjelaskan perubahan gelar Sultan kepada DPRD.</p>	<p>menurut Heru, perubahan nama bertentangan dengan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 18 ayat 1 UUK. "Perubahan satu kata implikasinya sangat luas," terang dia.</p>
Sultan mengatakan secara resmi pemerintah harus mengetahui Sabda Raja	<p>Menurut Inung, perubahan gelar Sultan merupakan persoalan yang serius. Dia khawatir Joga kehilangan ruh spiritual dengan ditilangkannya klausul Khalifatullah. Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan perubahan gelar juga harus ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.</p>	<p>"Kalau Gubernur dan Pemda DIY tidak ada inisiatif bertemu DPRD, kami yang akan mengundang Gubernur dan Pemda untuk menjelaskan," tegas Inung.</p>	<p>Menurut Heru, nama Hamengku Bowono identik dengan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai satu kesatuan entitas sekaligus identitas peradaban budaya. "Ketika diganti Hamengku Bowono yang tidak sepadan dengan terminologi Ngayogyakarta, bagaimana?," ucapnya</p>
<p>Dewan menilai perubahan gelar Sultan berimplikasi terhadap perubahan naskah Undang-undang No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK).</p>	<p>Inung kembali menghawatirkan DPR RI akan menganggap UUK sudah tidak relevan di DIY sehingga berpotensi dicabutnya hak keistimewaan untuk DIY, karena keistimewaan DIY masih dipantau Panitia Kerja (Panja) UUK di DPR RI.</p>	<p>Penjelasan Gubernur dan Pemda DIY, menurut Inung menjadi penting agar semua pihak baik Kasultanan, Kadipaten, Pemda DIY, DPRD, serta masyarakat Jogja secara umum tidak boleh beda tafsir dalam memaknai UU Keistimewaan DIY.</p>	<p>"Sama dengan Presiden RI identik dengan negara kesatuan RI sebagai simbol kenegaraan. Apa jadinya jika diganti Negara Persatuan RI yang identik dengan federasi," imbuh Heru.</p>
<p>Sultan mengeluarkan Sabda Raja, Kamis, pekan lalu, di Siti Hinggil, Kompleks Kraton. Poin dalam Sabda Raja tersebut, di antaranya, menghilangkan klausul Khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan, mengganti klausul Burwono menjadi Bowono, mengubah perjanjian pendiri Mataram Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga akan menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.</p>	<p>Inung mengakui Sabda Raja merupakan hak internal Kraton. Namun, ketika persoalan internal Kraton itu berpotensi mengubah UUK, maka Dewan harus mengetahuinya. Idealnya, kata</p>	<p>Secara pribadi Inung mengharapkan semua pihak bisa menerima keistimewaan DIY yang baru seumur jagung. Menurut dia, keistimewaan DIY yang disahkan sejak 2012 lalu sampai saat ini belum mampu direalisasikan secara utuh.</p>	<p>Sementara itu, Sultan berencana menyampaikan poin Sabda Raja kepada Kemendagri, hari ini (Senin). "Tembelahan otomatis ke Pemda dan DPRD juga," kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan, Sabtu (2/5).</p>
<p>Wakil Ketua I DPRD DIY Arif Noor Hartanto memaparkan, gelar Sultan yang melekat dengan nama saat ini sudah tercatat dalam</p>		<p>Dosen Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram, Heru Wahyu Kismoyo menyatakan, jika nama Sultan Hamengku Bowono diganti dengan nama lain, apalagi gelarnya tidak sama sebagaimana yang tercantum dalam UUK, tentunya Sultan, bukan lagi pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan bukan lagi Gubernur DIY, atau tidak dapat diajukan sebagai calon gubernur DIY. Sebab,</p>	<p>Sultan mengatakan secara resmi pemerintah harus mengetahui Sabda Raja. Disinggung apakah arah dari Sabda Raja itu Sultan ingin meng-amandemen UUK? Sultan menjawab tidak tahu. "Ya terserah pusat saja," kata raja yang memiliki nama kecil Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini.</p>

3. Selasa 5 mei 2015

► SABDA RAJA

Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik

Ujang Hasanudin & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan HB X mengungkapkan kerabat Sultan merasa terpukul dengan situasi terjadi di internal Kraton saat ini.

Kondisi Kraton agak pelik setelah Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja, Kamis (30/4).

Poin dalam Sabda Raja meliputi menghilangkan frasa khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan,

mengganti Buwono menjadi Bawono, mengubah perjanjian pendiri Mataram Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga akan menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

“Kami terpukul sekali. Ke mana-mana ditanya, bingung mau menjelaskan [Sabda Raja] bagaimana,” ungkap Prabukusumo sesuai ziarah di makam Raja Mataram Ki Ageng Pamanahan, Kotagede, Jogja, Senin (4/5).



<http://goo.gl/GPYMaH>

● Lebih Lengkap Halaman 7

Kerabat Sultan...

Ziarah tersebut diikuti kerabat Sultan, seperti GBPH Yudhaningrat, GBPH Cakraningrat, dan GBPH Condroidiningrat. Gusti Prabu, sapaan akrab GBPH Prabukusumo, mengatakan ziarah itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur, karena nama pendiri Mataram, kata Gusti Prabu, disebut-sebut oleh Sultan dalam Sabda Raja.

Gusti Prabu bingung atas apa yang dilakukan Sultan. Bahkan, sebut Gusti Prabu, Sultan menghilangkan gelar khalifatullah dan kalimat assalamualaikum (dalam Sabda Raja). Ia mengharapkan Sultan minta maaf kepada umat Islam, keluarga, dan masyarakat Jogja.

Ia mengaku apa yang dilakukannya bersama kerabat Sultan lainnya demi kebaikan bersama, “Tak punya pamrih,” kata Gusti Prabu.

Pria yang menjabat Ketua Umum KONI DIY ini menegaskan keluarga Kraton akan mengambil langkah jika Sultan jadi mendaftarkan perubahan gelar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, nama dan gelar yang melekat pada Sultan merupakan

hak paten dari HB I sampai HB IX. Gusti Prabu yakin Kemendagri tidak akan gegabah memutuskan perubahan nama. “Karena bisa digugat ke PTUN oleh keturunan HB I-HB IX,” ujar dia.

Selesai ziarah di makam Ki Ageng Pamanahan dan Senopati di Kotagede, rombongan kerabat Sultan melanjutkan ziarah ke makam Ki Ageng Giring di Paliyan, Gunungkidul.

Beberapa kerabat Kraton yang hadir di makam Ki Ageng Giring meliputi GKR Pembayun dan GKR Bendhoro, GBPH Prabukusumo,

GBPH Yudhaningrat, GBPH Condroidiningrat didampingi KRT Poerbokusuma atau dikenal RM Acun Hadiwijoyo, serta Raden Rijo Jaganegara.

GKR Pembayun enggan memberikan komentar dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan pribadinya.

Terpisah, pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Nikmatul Huda, mengatakan Sabda Raja tidak bisa digugat ke PTUN, karena Sabda Raja bukan bagian dari produk hukum, melainkan aturan internal Kraton.

Ia mengaku perubahan gelar Sultan bisa mengubah nomenklatur dalam naskah Undang-undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Perubahan nomenklatur bisa dilakukan oleh DPR RI selalu pembuat Undang-undang Keistimewaan.

Nikmatul Huda menilai Sabda Raja tidak lepas dari keinginan Sultan untuk meloloskan anaknya menjadi Gubernur DIY. Namun, karena dalam internal Kraton tidak ada aturannya, kata dia, Sultan melakukan perubahan pakem (aturan). “Maka bisa timbul reaksi di Internal Kraton,” kata dia.

Sebelumnya, Sultan mengatakan secara resmi pemerintah harus mengetahui Sabda Raja. Sultan juga menyerahkan implikasi Sabda Raja terhadap UU/K kepada Pemerintah Pusat.



GBPH Prabukusumo (kiri) dan GBPH Yudhaningrat (kanan) berjalan menuju kompleks makam Ki Ageng Pamanahan, Kotagede, Jogja, untuk berziarah, Senin (4/5).

4. Rabu 6 Mei 2015

Pembayun Calon Ratu

JOGJA-Raja Kraton

JOGJA-Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga Gubernur DIY Sri Sultan HB X mempersiapkan putri pertamanya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, menjadi penerus takhta Kraton.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Persiapan Pembayun menjadi Putri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta ini dikukuhkan melalui prosesi Dawuh Raja yang

Sultan menegaskan takhta Kraton harus dipegang oleh keturunan Sultan langsung.

Gelar Mangkubumi yang dimiliki Pembayun menjadikannya penerus kepemimpinan Kraton.

digelar secara tertutup di Siti Hinggil, Kompleks Kraton, Selasa (5/5). Dalam prosesi Dawuh Raja tersebut, Sultan mengganti gelar Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hawining Bawono Langgeng Ing Mataram. Prosesi Dawuh Raja hanya berlangsung sekitar 20 menit.

► Lebih Lengkap Halaman 7

► SABDA RAJA

Pembayun Calon...

Sultan datang ke Siti Hinggil bersama permaisuri GKR Hemas dari kediamannya di Kraton Kilen sekitar pukul 10.50 WIB. Sultan mengenakan pakaian kebesaran Raja Kraton.

Sebelumnya sejumlah kerabat Kraton, sentana dalem, dan abdi dalem datang lebih dulu ke Siti Hinggil. Sekitar pukul 11.10 WIB, Sultan keluar dari Siti Hinggil diikuti Krabat Kraton. Pertemuan Sultan bersama kerabatnya dilanjutkan di Kraton Kilen.

Namun sejumlah Krabat Sultan lainnya tidak hadir dalam acara ini, seperti Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat.

Sumber *Harian Jogja* di internal Kraton mengatakan selain mengukuhkan gelar Pembayun, Sultan juga menegaskan takhta Kraton harus dipegang oleh keturunan Sultan langsung. "Penerusku kudu pancerku dewe [keturunan sedarah]," katanya menirukan ucapan Sultan, melalui

ponsel, kemarin.

Dia mengatakan gelar Mangkubumi yang dimiliki Pembayun otomatis menjadikannya penerus kepemimpinan Kraton. "Otomatis sebagai putri mahkota," kata dia. Salah satu abdi dalem yang menjabat sebagai Panepan Masjid Kraton, Raden Wedono Ngabdul Sada juga mengungkapkan hal serupa. "Ngeresmiken [meresmikan] gelar Pembayun *dados* [menjadi] GKR Mangkubumi," kata dia saat keluar dari Siti Hinggil.

Parentah Hageng Kraton, KRT Yudha Hadiningrat, mengatakan acara itu dihadiri kerabat Kraton dan Pakualaman. Pria yang memiliki nama asli Nuryanto ini belum bersedia memberikan keterangan soal Dawuh Raja itu. Yang jelas, kata dia, isi Dawuh Raja ini berbeda dengan Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan, beberapa waktu lalu.

"Nanti ada konferensi pers dari Kraton. Bukan kapasitas saya menjelaskan," ujar dia sambil berjalan menuju Kraton Kilen. Sementara itu, GBPH Prabukusumo

dan GBPH Yudhaningrat belum bisa memberikan tanggapan tentang Dawuh Raja. Gusti Prabu, sapaan akrab GBPH Prabususumo mengatakan masih menunggu kedatangan kerabat Kraton lainnya dari Jakarta untuk mendiskusikan apa yang diucapkan Sultan.

Sehari sebelumnya, Senin (4/5), Gusti Prabu beserta GBPH Yudhaningrat, GBPH Cakraningrat, dan GBPH Cokrohadinengrat melakukan ziarah ke makam pendiri Mataram Islam Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati di Kotagede, Jogja.

Ziarah tersebut sebagai wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus memintakan maaf untuk Sultan yang dianggap bertindak keluar dari adat karena mengeluarkan Sabda Raja, Kamis (30/4).

Rombongan Gusti Prabu melanjutkan ziarah ke Makam Ki Ageng Giring di Paliyan, Gunungkidul. Namun, di kompleks Makam Ki Ageng Giring sudah ada dua keponakannya yang sedang

berziarah, yakni Pembayun dan Condrokirono. Pertemuan rombongan Gusti Prabu dan Pembayun ini terjadi secara kebetulan.

Ziarah ke makam pendiri Mataram diakui Gusti Prabu karena Sultan telah menyebut nama Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan.

Ada empat poin yang dikeluarkan Sabda Raja, yakni menghilangkan gelar khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan, mengganti klausul Buwono menjadi Bawono, mengubah perjanjian pendiri Mataram Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga akan menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Ageng Koep dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Sementara, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Mangana, mengatakan Sultan berhak memilih gelarnya sendiri seperti juga raja-raja sebelumnya.

Menurut dia, keputusan menghilangkan gelar khalifatullah bisa dilihat sebagai sikap yang reflektif terhadap fungsi dan

kedudukannya sebagai raja. Khususnya sejak Kraton menjadi bagian dari Republik Indonesia. Gelar itu, lanjut dia, sifatnya sangat simbolik, karena dalam praktiknya gelar itu tidak sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan praktis.

Menurut dia, dari perspektif politik kemungkinan Sultan ingin membangun tradisi baru, dan sebagai antisipasi bagi kelanjutan suksesi di Jogja.

"Namun dari perspektif kebudayaan barangkali agak disayangkan kalau gelar itu ditanggalkan sekalipun fungsinya simbolik," kata Ketua Jurusan Sejarah FIB UGM itu.

Menurut dia, Sultan tahu persis seorang perempuan menurut Islam tidak diperkenankan sebagai pemimpin agama. "Jadi ada tidaknya gelar khalifatullah itu pengaruhnya secara praktis dalam keagamaan," katanya.

Ketika ditanyakan apakah nama atau gelar Mangkubumi itu identik dengan putra mahkota, Sri Mangana mengatakan gelar Mangkubumi tidak selalu diberikan untuk putra mahkota.

5. Kamis 7 mei 2015

... Sri Sultan HB X berziarah di makam Imogiri, ...
... sore.

... Adik-adik kerabat Sri Sultan HB X berziarah di makam Imogiri, Rabu (6/5) sore.

Konflik Kraton Meruncing

BANTUL—Konflik di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kian meruncing. Sejumlah kerabat Kraton bahkan tak lagi mengakui Sri Sultan HB X sebagai Ngarsa Dalem sekaligus Gubernur DIY.

Arif Junianto & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Adik-adik HB X akan menjangir aspirasi masyarakat untuk mengambil sikap atas konflik di Kraton.
- ▶ Sabda Raja atau Dawuh Raja akan berdampak pada Undang-undang Keistimewaan.

Ngarsa Dalem Ngayogyakarta menyandang gelar Khalifatullah dan Hamengku Buwono.

Arif Junianto & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat mengatakan sikap itu diambil sejumlah keluarga Kraton karena selama ini

Ngarsa Dalem Ngayogyakarta menyandang gelar Khalifatullah dan Hamengku Buwono. Pada Kamis (30/4), Sri Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja yang isinya menghapus dua kata tersebut dari gelar Raja Kraton Ngayogyakarta.

• Lebih Lengkap Halaman 7

Konflik Kraton...

Kata Buwono diganti Bawono sedangkan Khalifatullah hilang. Adik-adik Sultan baru akan kembali mengakui HB X jika kedua frasa itu dikembalikan dalam gelar Sultan. "Karena sudah tidak mengakui [HB X], jangan harap kami akan datang ketika diundang," ujar GBPH Yudhaningrat di sela-sela penyerahan honor kepada abdi dalem Kraton Kasunanan Surakarta di Jogle Kekanjengan, Imogiri, Bantul, Rabu (6/5).

Tetapi, jika HB X tetap bergeming, adik-adik Sultan tak sanggup berbuat apa-apa. "Kalau beliau masih nekat, kami tak bisa apa-apa kecuali menyerahkannya [masalah ini] kepada Tuhan saja," ujar GBPH Yudhaningrat yang kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah DIY.

Sebagai Raja, menurutnya, Sri Sultan HB X seharusnya bisa memilah antara posisinya sebagai raja dan orang tua. Menurutnya jika ingin memulihkan putra-putrinya, HB X sudah cukup melakukan banyak hal. "Lihat saja, putri-putrinya yang mana yang tak diberikan perusahaan? Tetapi kalau soal pengangkatan jadi ratu, itu kan lain soal," ujar dia.

Menurutnya, Sri Sultan telah merusak tatanan yang ada di Kraton. Padahal, sejatinya HB X tinggal melanjutkan paugeran yang sudah tersedia. Oleh karena itu, jika ingin mengubah paugeran dengan mengganti nama Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono serta menghilangkan gelar Khalifatullah, HB X diminta mendirikan kerajaan baru. Kemudian, sebutan Hamengku Bawono bukan yang kesepuluh tetapi pertama atau *kapisan*. Meski begitu, para pangeran mengaku tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada kudeta.

Sementara, 10 adik HB X ziarah di makam para leluhurnya di Imogiri, Bantul, Rabu sore. GBPH Prabukusumo mengatakan ziarah dilakukan untuk meminta maaf kepada para leluhur atas apa yang dia sebut sebagai kekhilafan yang telah dilakukan oleh kakaknya.

"Semuanya [adik Sultan] ikut, kecuali Gusti Hadi Suryo yang saat ini sakit," ucapnya.

Menurutnya, HB X sudah melanggar paugeran dan melenceng jauh karena menghapus gelar Khalifatullah dan tradisi pengucapan salam (assalamualaikum) di lingkungan Kraton.

Rabu malam, adik-adik HB X menggelar pertemuan keluarga di kediaman Gusti Prabu.

Rencananya, Kamis (7/5) pagi ini, mulai pukul 10.00-15.00 WIB, pihaknya akan menggelar *open house* di kediaman GBPH Yudhaningrat. Kegiatan itu untuk menjangir aspirasi masyarakat secara luas. "Kami pensilakan masyarakat untuk hadir mengutarakan unek-uneknya. Ini penting untuk referensi kami dalam mengambil sikap," tegasnya.

Di waktu yang hampir bersamaan dengan ziarah adik-adik HB X ke makam raja-raja di Imogiri, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi juga ziarah ke permakaman tersebut. GKR Mangkubumi yang sebelumnya bergelar GKR Pembayun didampingi suaminya, KPH Wironegoro, beserta adiknya, GKR Condokirino, GKR Maduretno dan suami KPH Purbodiningrat serta GKR Bendara.

Di makam Imogiri, GKR Mangkubumi bertemu dengan adik-adik HB X. Namun antara paman dan keponakan itu tidak saling bertegur sapa ketika bertemu. Ini merupakan pertemuan yang kedua setelah pertemuan saat ziarah di Makam Ki Ageng Giring di Sodo, Paliyan, Gunungkidul.

Sementara itu, Pagnyuban Dukuh (Kepala Dusun) dan Perangkat Desa Se-DIY, Semar Sembogo khawatir keputusan Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja dan Dawuh Raja akan melunturkan Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK). Ketua Semar Sembogo Sukiman, mengatakan Semar Sembogo akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY Kamis ini. "Kami ingin tahu bagaimana eksekusi keputusan DPRD terhadap Undang-undang Keistimewaan," kata Sukiman.

6. Jumat 8 mei 2015

Rayi Dalem Galang Dukungan



JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto

Sejumlah adik HB X bertemu dengan sejumlah tokoh di Ndalem Yudhanegaran, Jl. Ibu Ruswo, Kota Jogja, Kamis (7/5).

JOGJA—Rayi dalem atau adik-adik Sri Sultan HB X menggalang dukungan dari masyarakat untuk

▶ **Sejumlah keluarga Kraton mendatangi Menteri Dalam Negeri untuk mendorong adanya rapat keluarga menyangkut**

atau adik-adik
Sri Sultan HB X
menggalang dukungan
dari masyarakat untuk
menyikapi Sabda Raja
dan Dawuh Raja.

Ujang Hasanudin & Ringkang
Gumiwang
redaksi@jibinews.co

Mereka berkumpul di Ndalem
Yudhanegaran (Kediaman GBPH
Yudhaningrat) di Jl. Ibu Ruswo,
Kamis (7/5). Kerabat Sultan dari
trah HB IX yang hadir adalah
GBPH Pakuningrat, GBPH

Kraton mendatangi
Menteri Dalam Negeri
untuk mendorong
adanya rapat
keluarga menyangkut
Sabda Raja.

► Para rayi dalem dari
Jakarta bertemu
dengan HB X di
Kraton Kilen, Kamis
sore.

Suryodiningrat, GBPH Hadinegoro,
GBPH Suryonegoro, dan GBPH
Suryo Mataram.

● Lebih Lengkap Halaman 7

Rayi Dalem...

Mereka yang merupakan putra
HB IX dari ibu GRAY Ciptomerti
datang dari Jakarta karena persoalan
di internal Kraton.

Mereka berhimpun dengan
rayi dalem yang ada di Jogja,
seperti GBPH Prabokusumo, GBPH
Yudhaningrat, GBPH Cakraningrat,
dan GBPH Condrotiningrat.
Selain rayi dalem, sejumlah
tokoh masyarakat juga hadir,
yakni Ketua Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) Abdul
Muhaimin, mantan Wakil Wali
Kota Jogja, Syukri Fadholi, serta
sejumlah pegiat lembaga swadaya
masyarakat (LSM).

Sejumlah orang terus berdatangan
secara bergantian ke Ndalem
Yudhanegaran sejak pukul 10.00
WIB hingga sore hari. Sebagian
besar yang datang adalah mereka
yang tidak sepekat dengan
keputusan Sultan mengeluarkan
Sabda Raja dan mengubah nama
GKR Pembayaran menjadi GKR
Mangkubumi.

GBPH Yudhaningrat mengatakan
para rayi dalem berkumpul karena
beberapa di antara mereka belum
mengetahui apa yang dimaksudkan

Sultan dalam Sabda Tama, Sabda
Raja, dan Dawuh Raja. Gusti
Yudha, sapaan karib GBPH
Yudhaningrat, membuka rumahnya
untuk masyarakat Jogja yang ingin
menyampaikan pendapatnya terkait
dengan keputusan HB X.

Pria yang menjabat Asisten
Administrasi Umum Sekretaris
Daerah DIY ini menyatakan tak
ada maksud lain dalam peninjauan
aspirasi masyarakat tersebut. "Kami
ingin supaya Kraton bisa jejeg
[tegak] tak menabrak aturan
pokok," ujar dia.

GBPH Suryodiningrat
mengungkapkan, ada enam rayi
dalem yang tinggal di Jakarta.
Mereka jarang ke Jogja, kecuali
ada acara-acara resmi di Kraton.
Selama ini, Sabda Tama, Sabda
Raja, dan Dawuh Raja tidak
diberi tahu kepada rayi dalem
yang tinggal di Jakarta.

Setelah berkumpul di Ndalem
Yudhanegaran, para rayi bertemu
dengan HB X di Kraton Kilen,
Kamis sore. Pertemuan berlangsung
sekitar 1,5 jam, namun hasilnya
belum dipublikasikan.
Rayi dalem yang bertemu

"
Kami ingin supaya
Kraton bisa
jejeg [tegak] tak
menabrak aturan
pokok

GBPH Yudhaningrat

Sultan adalah para putra HB
IX dari ibu GRAY Ciptomerti,
yakni GBPH Suryonegoro, GBPH
Suryodiningrat, GBPH Pakuningrat,
GBPH Cakraningrat, dan GBPH
Suryomataram. Sementara GBPH
Hadinegoro tidak ikut karena
sakit.

Mereka bertemu Sultan sejak
pukul 16.30 WIB, dan baru keluar
dari kediaman Sultan sekitar
pukul 18.15 WIB. Kelima rayi
dalem keluar dari Kraton Kilen
dalam satu mobil, yakni Toyota
Avanza AB 1921 MN warna hitam

GBPH Suryodiningrat mengatakan
belum bisa menjelaskan hasil
pertemuannya dengan HB X. "Kami
akan mengadakan pertemuan
terlebih dahulu dengan kangmas-
kangmas lainnya," kata dia.

Sementara itu, seorang abdi
dalem bernama Mas Wedana
Nitiakarya mengembalikan
gelar abdi dalem ke Kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai
bentuk protes atas Sabda Raja
yang dikeluarkan HB X.

Mas Wedana Nitiakarya yang
bernama asli Kardi diangkat
menjadi abdi dalem pada Agustus
2011 melalui surat kekancangan
No. 70/ PHK/TDP/VIII/2011,
Ngayogyakarta Hadiningrat,
Rebo Legi, 01 Syawal 1944.

Surat kekancangan dikembalikan
di Ndalem Yudhanegaran, Kamis.
Kekancangan tersebut kemudian
diterima oleh GBPH Cakraningrat
selaku Pengageng Tepas Danarto Puro
(bagian keuangan Kraton).

Kardi mengembalikan kekancangan
abdi dalem karena ia merasa
Raja Kraton Ngayogyakarta
sudah bukan raja lagi karena
menyimpang dengan menganti

gelar Sultan. "Saya sebagai
abdi dalem merasa *ora nyem
meneh* [tidak lagi tenteram],"
ucap dia.

Gusti Cakra mengaku baru
kali ini ada yang mengembalikan
kekancangan abdi dalem. Dia
khawatir akan diikuti abdi
dalem lainnya yang mengambil
tindakan serupa sehingga bisa
mengancam kekosongan abdi
dalem Kraton.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri
Tjahjjo Kumolo menegaskan
pemerintah tidak akan terlibat
dalam urusan internal Kraton.
Tjahjjo Kumolo mengatakan
urusan HB X sebagai gubernur
diatur oleh undang-undang.
Meski demikian, tidak seluruh
urusan Kraton menjadi perhatian
pemerintah.

Tjahjjo mengaku sebagian
keluarga Kraton mendatangi
dirinya untuk mendorong adanya
rapat keluarga terkait Sabda Raja
tersebut. Meski begitu, dia
mengaku dirinya tidak memiliki
kapasitas untuk mengeluarkan
rekomendasi, saran, maupun
kebijakan sejenisanya.



Raja Kraton Ngayogyakarta Sultan HB X dan Wakil Gubernur DIY Mangku Mangkubumi Raja (GKR) Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Matarem (GKR) Sultan Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Matarem saat memberikan penjelasan terkait polemik yang terjadi akhir-akhir ini di Kraton.

Saya Menjalankan Perintah Leluhur

JOGJA-Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X akhirnya memberi penjelasan terkait polemik yang terjadi akhir-akhir ini di Kraton.

Ulang Hasrah
hasrah@hadiningrat.com

GKR Mangkubumi menatakan gelar

Saya Menjalankan...

Sultan mengatakan bahwa dua hal itu dikeluarkan setelah dirinya menerima perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui para leluhurnya. Dan menjelaskan sejumlah persoalan termasuk tidak digunakannya kata Assalamuallaikum. "Sabda Raja ini tidak pakai Assalamuallaikum. Saya merasa ini adalah dawuh Allah lewat leluhur saya menyampaikan titah dawuh ini kepada orang lain. Masa kalau memang Allah pakai Assalamuallaikum kan tidak? Tapi jangan mengatakan di Kraton tidak boleh pakai assalamuallaikum," katanya.

Sementara itu terkait perubahan dari Buwono menjadi Bawono adalah perluasan cakrawala. "Buwono itu jagat alit [kecil], Bawana itu jagat ageng [besar], jadi seumpama Buwono itu daerah, Bawono itu nasional, kurang lebih seperti itu," katanya.

Sedang dari kaping sedasa menjadi kasepuh, adalah nomor urut. Sultan mencontohkan kapisan, kapindo, katelu dan seterusnya. "Jadi kasadasa ya kasepuh, tidak bisa disebut kaping sedasa. Kenapa karena kaping itu hitungan tambahan, bukan tir gumantri [nomor urut]," jelasnya.

Muncul nama Suryaning Mataram, menurut Sultan, dasarnya perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Kyai Giring sudah selesai (bukan diubah). "Mataram lama dari zaman Ken Arok Singosari sampai Pajang itu juga Mataram yang disebut sebagai Mataram lama. Mataram Baru dari zaman Eyang Patembahan Senapati sampai sekarang. Jadi ada Mataram lama kemudian ada perjanjian Pemanahan dan Giring itu memisahkan dengan Mataram Baru. Karena perjanjian itu sudah selesai maka dari zaman Ken Arok sampai Pajang sampai Patembahan

Senapati dan sekarang dasarnya adalah keturunan. Tidak dipisahkan lagi antara yang lama dan yang baru karena ada perjanjian tadi."

Sultan menjelaskan pergantian gelar Khalifatullah menjadi Langgenging Tata Pantatagama.

"Langgenging kan diidhawuhi Gusti Allah nggeng preraturung jagat [melestarikan dunia sesuai perintah Allah dengan aturan dunia]," papar Sultan.

Perintah lain yang menurut Sultan dia terima adalah bahwa keadaan sekarang tidak bisa dianggap sepele seperti raja sebelumnya karena keadaan yang berubah. "Saya kebagian tidak kena perjanjian. Karena saya yang diperintah untuk zaman baru," katanya.

Sultan mengaku dawuh ini mendadak yakni baru sehari sebelum dikeluarkan. Sehingga pemberitahuan kepada sejumlah adik dilakukan secara mendadak termasuk melalui SMS. Tetapi menurut Sultan dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa.

"Tidak ada yang namanya mendadak. Dawuh itu kewenangan Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta [turun kapan saja]. Dan dawuh ini tidak bisa kapanca [tidak dipercaya dan disepelekan]. Raja yang tidak menjalankan perintah lebih berat menerima marah dan siksa," katanya lagi.

Sultan menyadari Sabda Raja dan Dawuh Raja bakal menimbulkan perdebatan di kalangan saudara-saudaranya. Namun jika tidak disampaikan, pernah tersebut justru akan menjadi risiko bagi Sultan maupun bagi rayi-rayinya atau adik-adiknya. "Jika Raja tidak melaksanakan perintah, risiko yang muncul lebih besar ketimbang orang lain," kata Sultan dalam dialog menggunakan

bahasa Jawa dengan warga Jogja mengenai Sabda Raja dan Dawuh Raja di rumah putri sulungnya, GKR Mangkubumi (Pembayun), Jumat (8/5). Sebelum menerima wahyu, Sultan mengaku sudah lama melalui proses sendiri di Kraton, di sebuah kamar khusus. Ia juga menyatakan tidak ada guru atau dukun yang mempengaruhi keluarnya Sabda Raja dan Dawuh Raja.

"Saya tidak apa-apa disepelekan adik dan orang lain yang tidak tahu seajayanya Sabda Raja dan Dawuh Raja itu. Saya tidak bereaksi apa-apa. Tidak apa-apa daripada saya mendapat marah Tuhan," katanya.

Sultan juga mengatakan dalam prosesi Dawuh Raja di Bangsal Siti Hinggil, Pembayun berjejer dengan para adik dan kerabat Kraton lainnya. Sultan kemudian meminta Pembayun untuk duduk di kursi Watu Gilang, batu yang biasa ditempati calon Sultan. "Di situ saya menetapkan [Pembayun]. Dia berhak duduk di kursi itu," tegas Sultan. Menurut Sultan, semestinya yang tidak memahami Sabda Raja dan Dawuh Raja menyakan langsung datang ke Kraton Kilen, bukan memberikan komentar yang kurang tepat.

Sebab, sambung Sultan, untuk bisa memahami Sabda Raja, butuh rasa, bukan pikiran, karena pikiran penuh kepentingan dan nafsu. Sultan mengharapkan adik-adiknya bisa memahami sikap tersebut. "Saya coba membangun komunikasi," katanya. Sultan juga mengatakan sengaja menggelar pertemuan dengan warga di kediaman putri pertamanya dan tidak di Kraton. Sebab, Sultan tidak ingin pertemuan tersebut menimbulkan prasangka. Pertemuan itu juga dakuinya bukan atas inisiatif undangan Sultan.

"Saya tak mau berseberangan dengan saudara sendiri," katanya.

Sultan di bagian lain juga menyinggung ketika Sri Sultan Hamemayung Buwono IX masih hidup, dirinya yang selalu ditunjuk untuk melakukan berbagai hal. "Dari saya masih bernama Herjunadarpita sampai Mangkubumi ke mana-mana saya yang disuruh," tambahnya.

Termasuk salah satunya membangun petilasan Kembang Lampir di Gunungkidul, sebuah tempat yang digunakan oleh Patembahan Senapati bertapa sebelum menjadi Raja.

Tanggung Jawab

Sementara itu, GKR Pembayun yang kini berganti nama menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram mengaku gelar yang disandangnya berarti tugas dan tanggung jawabnya semakin berat.

"Bagi saya dengan duduk disitu [Watu Gilang], batu nyang biasa ditempati calon Sultan] tugas dan beban saya semakin banyak," ucap Pembayun.

Pembayun mengaku tidak mengetahui apa yang akan disampaikan dalam Dawuh Raja, Selasa (5/5). Istri dari Kanjeng Pangeran Wironegoro ini tiba-tiba diperintahkan untuk berkumpul di Siti Hinggil, sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat itu, Pembayun pun hanya mengenakan kebaya biasa. "Saya enggak tahu sebelumnya, sampai saya diberi nama itu [GKR Mangkubumi]," katanya.

Pembayun menyatakan ikhlas menjalani tanggung jawab setelah punya gelar anyar. Ia akan senantiasa menjalani apa yang sudah ditetapkan

Ngrasa Dalem.

Disinggung soal beberapa kerabat Sultan yang tidak setuju dengan gelar tersebut, Pembayun mengatakan pro-kontra pasti terjadi. Da tetap menghormati para rayi Sultan. "Bagaimana pun, mereka om saya," ujarnya.

GKR Mangkubumi mengaku masih membuntakan himbungan roma-roma (rayi Sultan) untuk melastarkan kebudayaan dalam Kraton.

Adik GKR Mangkubumi, GKR Bendara tak bisa komentar banyak soal gelar baru Mangkubumi. Namun baginya GKR Mangkubumi adalah sosok yang mengayomi bagi adik-adiknya. Bahkan sampai hal-hal terkecil. Bendara mengharapkan Mangkubumi lebih kuat dan terus mengayomi sesuai perintah HB X.

GKR Mangkubumi selama ini aktif dalam berbagai kegiatan baik kegiatan organisasi. Bahkan saking sibuknya ia jarang di rumah. "Tapi Mbak Mangkubumi menghususkan hari Minggu untuk keluarga," ujar Bendara.

Sebelumnya diberitakan Sabda Raja dan Dawuh Raja ini memunculkan polemik dan ditentang sejumlah adik Sultan. Para kerabat ini menyebut Sultan telah melanggar paturan dengan mengganti gelar dan mengubah sejumlah hal termasuk perjanjian para pendiri Mataram. Bahkan beberapa adik Sultan menyatakan tidak akan mengakui Sultan sebagai raja jika tetap mengganti namanya.

Sultan meminta agar masalah ini dilihat dengan hati yang bening. Tidak sekadar menggunakan pikiran tetapi menggunakan hati. Sehingga tidak akan memunculkan kesalahpahaman.

▶ **GKR Mangkubumi mengatakan gelar baru yang dia sandang mendatangkan tanggung jawab besar.**

▶ **HB X mengaku menerima perintah Tuhan yang disampaikan melalui para leluhur**

Dalam jumla pers yang dilakukan di Kraton Kilen Jumat (8/5) Sri Sultan menjelaskan sejumlah masalah termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan melalui Sabda Raja dan pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi melalui Dawuh Raja.

Pada kesempatan kemarin Sri Sultan membacakan secara terbuka isi dari Sabda Raja dan Dawuh Raja. Bunyi asli Sabda Raja yang dikeluarkan tersebut adalah *Kawuningana sira kabeh abdiningsun putri dalem sederek dalem sentana dalem lan abdi dalem. Nampa weninging dawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan ramaningsun, eyang-eyang ingsung para leluhur Mataram wiwit wektu iki ingsun nampa dawuh kanugrahan dawuh Gusti Allah Gusti Agung kuasa cipta asma kalenggahan ingsun Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggan Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama. Sabdaraja iki perlu dimangerteni diugemi lan ditindakake ya mengkono sabdaningsun.*

Inti dari Sabda Raja itu adalah pengumuman Sultan bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk mengubah namanya dari semula *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Bawono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Inggang Jumeneng Kaping Sedasa* menjadi *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama*

Sementara Dawuh Raja yang dikeluarkan 5 Mei 2015 berbunyi: *Sira abdi ingsun seksenana Ingsun Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama kadawuhan netepake putri ningsung Gusti Kanjeng Ratu Pembayun katetepake Gusti Kanjeng ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng Ing Mataram. Mangertenono yo mengkono dawuh Ingsun.*

Inti dari Dawuh tersebut adalah mengubah nama GKR Pembayun yang sekaligus mengarah pada pengangkatan putri tertua Sultan itu sebagai putri mahkota.

8. Minggu 10 mei 2015

11 Pangeran Kukuh Tolak Sabda Raja

Kraton Dikepung Spanduk Protes

"DIPENGGALIH, JANGAN DIPIKIR"

JOGJA—Para rayi dalem (adik-adik Sri Sultan HB X) sudah menyiapkan jawaban atas Sabda Raja dan Dawuh Raja yang dikeluarkan Sultan.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Sabda Raja yang diucapkan Sultan dinilai cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan adat dan pangeran Kraton

Jika Sultan memaksakan GKR Mangkubumi (Pembayun) menjadi putri mahkota dan selanjutnya menempati tahta Kraton dianggap berbahaya bagi kekhalfahan Mataram

Hasil rapat para rayi dalem atau pangeran akan disampaikan secara resmi oleh adik tertua Sultan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto. Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat mengatakan para pangeran sudah mendengarkan penjelasan Sultan soal Sabda Raja dan Dawuh Raja. Gusti Yudho—sapaan akrab GBPH Yudhaningrat—sudah mencoba memahami Sabda Raja dengan olah pikiran dan hati, namun tetap tidak bisa dipahami.

"Kami tetap belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 tetap menentang," kata Yudhaningrat saat ditemui di kediamannya, Sabtu (9/5).

Oleh karena itu para pangeran pun akan menjawab. Jawaban dari 11 pangeran, menurut Gusti Yudho, awalnya akan disampaikan pada Jumat, malam

kemarin. Namun, KGPH Hadiwinoto, selaku yang ditunjuk menjadi juru bicara ke-11 pangeran belum bisa ditemui.

Ke-11 pangeran itu adalah GBPH Cakraningrat, G B P H Suryodiningrat, GBPH Suryonezatam, GBPH Pakuningrat, GBPH Hadiworo, dan GBPH Pateyonengoro.

Mereka adalah para putra HB IX dari satu ibu Kanjeng Raden Ayu (KRAY) Ciptomurti. GBPH Prabokusumo, GBPH Yudhaningrat, dan GBPH Condrolingrat (ketiganya putra HB IX dari ibu KRAY Hastunggoro).

KGPH Hadiwinoto dari ibu KRAY Wilyaningrum (satu ibu dengan Sultan HB X), serta GBPH Hadisuryo (dari KRAY Pintoko Purnomo).

Menurut Gusti Yudho, Sabda Raja yang diucapkan Sultan cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan adat dan pangeran Kraton. "Ibaratnya kereta sudah keluar dari rel yang sudah ada," ujarnya.

• Lebih Lengkap Halaman 11



SNMPTN 2015

137.005 Siswa Diterima di PTN

Harlan Jogja
redaksi@harianjogja.com



JAKARTA—Sebanyak 3.371 siswa diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja. Mereka adalah bagian dari 137.005 siswa yang diterima di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015.

Ketua Umum SNMPTN 2015 Prof Rochmat Wahab mengungkapkan, untuk 2015 ada 852.093 siswa yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 137.005 diterima di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.

Dari data jumlah pendaftar SNMPTN juga masih didominasi SMA dengan jumlah pendaftar sampai 617.507, SMK 141.014 dan MA 93.572. "Dari jumlah yang mendaftar 852.093, sebanyak 137.005 atau sekitar 16,08 persen siswa diterima di PTN seluruh Indonesia. Ini ada kenaikan 10 persen dari tahun lalu. Selain itu, untuk siswa bidik misi dari 152.097 yang mendaftar hanya 31.908 siswa yang diterima," terang Prof. Wahab di Gedung D Kemendikbud, Sabtu (9/5).

Wahab menjelaskan, provinsi paling banyak yang diterima Jawa Timur 19.750 atau 14,39 persen, diikuti Jawa Tengah 11.777, Sumatera Utara 8.781, Sulawesi Selatan 6.010, Sulawesi Tenggara 5.598, Sumatera Barat 5.512, DKI Jakarta 5.441, Sulawesi Utara 4.964 dan Riau 4.897.

Para siswa dari seluruh Indonesia paling banyak diterima di Universitas Brawijaya dengan 5.955 siswa, Universitas Haluoleo dengan 5.600 siswa, Universitas Negeri Manado 3.958, Universitas Diponegoro 3.538 siswa, Universitas Pendidikan Indonesia 3.526, Universitas Riau 3.496, UGM 3.371 Universitas Sumatera Utara (USU) 3.294, Universitas Negeri Malang 3.106 dan Universitas Padjadjaran (Unpad) 3.097.

"Pengumuman kelulusan bisa dilihat di www.snmptn.ac.id. Selain itu bisa dilihat juga di halaman universitas seperti UI, ITS, ITS, Undip, Unair, UGM, Unri, Unhas, Unpar, Unand dan UPB. Peserta yang lulus harus melihat prosedur pendaftaran di PTN masing-masing," tutup Wahab.

Menurut Wahab ada lima hal yang harus diperhatikan para siswa yang lulus SNMPTN 2015.

• Lebih Lengkap Halaman

kalau ada konsumen loyal di

11 pangeran...

Asisten Administrasi Umum Pemda DIY ini juga menyebut jika Sultan memaksakan putri sulungnya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi (Pembayun) menjadi putri mahkota, selanjutnya menempati tahta Kraton akan berbahaya bagi kekhalfahan Mataram, yang bermazhab patriarkhi, yang sudah berjalan sejak ratusan tahun.

"Mazhab kita yang sudah ratusan tahun nanti hilang, silsilahnya bagaimana? Silsilahnya kemana Setelah cucu Hamengku Bawono," jelas Gusti Yudho.

Gusti Yudho menyatakan, langkah yang akan ditempuh para pangeran adalah menyadarkan Sultan "Supaya beliau sadar bahwa langkahnya salah," tegasnya.

Ia juga menjamin Sultan tidak akan terkena risiko apapun dengan tidak melaksanakan Sabda Raja (yang disebut Sultan Dawuh Gusti Allah), karena itu sudah keluar dari adat.

GBPH Prabokusumo saat dihubungi melalui telepon selularnya, mengatakan sehari sebelum Sultan menjelaskan Sabda Raja kepada masyarakat Jogja, para rayi dalem sowan ke Ngarsu Dalem (Sultan). Dalam pertemuan itu diakui Gusti Prabu—sapaan akrab GBPH Prabokusumo, Sultan mengatakan apa yang diucapkannya itu adalah Dawuh Gusti Allah.

"Jangan marah, jangan tanya saya. Kalau enggak percaya silakan tanya kepada yang diatas." Kata Gusti Prabu, menirukan ucapan Sultan.

Menurut Gusti Prabu, jawaban kakaknya tersebut tidak bisa diterima oleh nalar. Gusti Prabu kembali mengungkapkan ucapan Sultan yang keluar dalam pertemuan dengan para rayi dalem. Menurut dia, Sultan menandakan kalau dirinya yang salah yang tidak melaksanakan perintah risikonya lebih besar daripada orang lain]" kata Sultan.

Sultan mengatakan tidak mudah memang memahami Sabda Raja hanya dengan pikiran, melainkan harus dengan roso (perasaan).

Spanduk Bermunculan

Setelah Sri Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja, berbagai spanduk muncul di Jogja. Spanduk itu terpasang antara lain di kawasan Titik Nol Kilometer, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Kauman, Pasar Ngasem, dan Simpang Gondomanan.

Identitas pada spanduk itu hanya tertulis Warga Kauman. Kauman merupakan kampung yang dihuni warga Muhammadiyah di Jogja yang terletak berdekatan dengan Kraton Jogja. Koordinator pemasangan spanduk itu, Muhammad Muslih, 32, mengaku spanduk itu sebagai protes terhadap Raja Kraton Jogja yang dianggap menyalahi adat-istiadat kraton.

"Raja yang menghapus khalifatullah dalam gelamnya seperti menurunkan wibawanya sendiri," ujar Muslih, yang berprofesi sebagai koordinator paguyuban parkir di area Alun-alun Utara itu.

Muslih mengaku setidaknya berhasil mencetak 200 spanduk sejenis untuk melawan dan memprotes Sabda Raja itu. "Kami pasang di seluruh kabupaten dan kota DIY biar warga tak cuma diam, tapi gumregah saat ada masalah seperti ini," ujarnya.

Muslih mengakui dana untuk membikin seluruh spanduk itu adalah dari patungan masyarakat, terutama kampungnya di Kauman. Ada yang menyumbang Rp20.000 sampai Rp1 juta. "Ini inisiatif kami sebagai warga yang peduli nasib Kraton sebagai sumbu budaya Jogja. Raja itu

9. Senin 11 mei 2015



Jamaah Nahdliyyin Mataram melakukan doa serta tabli di Bangsal Pengabli Ler, kompleks Makam Kotagede, Jogja, Minggu (10/5). Mereka keberatan dengan Sabda Raja yang mengganti gelar Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah yang disandang Sultan.

BANTUL—Penolakan terhadap Sabda Raja dan Dawuh Raja terus mengalir. Tak cuma kerabat Kraton, masyarakat di luar lingkungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun keberatan dengan sabda Sultan HB X.

Suksesi Kraton dianggap bukan sekadar persoalan internal karena akan memengaruhi situasi politik.

Sampai Sabtu siang, semua proses administrasi di Kraton masih menggunakan nama Sri Sultan Hamengku Buwono.

Kelompok agama di Jogja menolak penggantian gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah yang disandang Sultan HB X. Penolakan terhadap penggantian gelar itu diungkapkan Jamaah Nahdliyyin Mataram saat mengadakan pisonwan di Makam Raja-raja Mataram, Kotagede, Bantul, Minggu (10/5).

Koordinator Jamaah Nahdliyyin Mataram, Muhammad Alifunim, mengatakan pisonwan berupa tabli dan ziarah ke makam raja-raja Mataram tersebut bertujuan untuk menyampaikan unek-unek sekaligus pernyataan sikap terhadap sabda Raja yang dikeluarkan Sultan HB X.

"Kami memilih untuk bersikap netral dalam suksesi karena bukan ruang dan bagian kami, tetapi kami berkepentingan mempertahankan gelar Kalifatullah," ujarnya.

Pada Kamis (30/4), HB X mengeluarkan Sabda Raja. Inti dari Sabda Raja itu adalah pengumuman dari Sultan bahwa dia mendapat perintah untuk mengubah namanya dari semula *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan*

Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalgaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Selasa.

Setelah dikeluarkannya Sabda Raja, nama Sultan menjadi *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono Ingkang Jumeneng Kasepaluh, Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalgaga Langgenging Buwono Langgeng Langgenging Titu Panatagama. Frasa Sayidin Panatagama Kalifatullah diubah menjadi Langgeng Langgenging Titu Panatagama.*

Muhammad Alifunim menjelaskan Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah secara historis, sosial, dan kultural merupakan gelar bagi penerus Kerajaan Mataram Islam. Dia mengakui telah terjadi perubahan zaman, namun perubahan seharusnya tidak mengabaikan sejarah panjang tradisi dan adat Mataram Islam yang. Dia menganggap perubahan gelar telah menghapus fondasi batin dan karakter Islam Jawa dari Kraton Mataram yang selama ini mampu menjelaskan kebudayaan Islam Jawa dengan perubahan zaman.

Berita terkait di Halaman 3

• Lebih Lengkap Halaman 7

• Lebih Lengkap Halaman 7

Penjelasan Sultan...

la juga mengkhawatirkan perubahan gelar akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Pasal 1 Ayat 4 Pasal 18 Undang-undang (UU) No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY. "Kami berharap dengan pisonwan ini, Sultan dapat mendengar dan kembali menggunakan gelar Kalifatullah," ujar dia.

Namun, kata dia, pernyataan sikap Jamaah Nahdliyyin Mataram bukan pernyataan resmi Nadhalatul Ulama (NU).

Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan DIY sekaligus anggota Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Charis Zubair, mengatakan secara resmi PP Muhammadiyah belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan Sabda Raja. Akan tetapi, ungkapnya, sebagian anggota PP Muhammadiyah tidak setuju dengan penggantian nama

Sultan HB X dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Menurutny penggantian nama Buwono menjadi Bawono adalah alam semesta. Kalifatullah, ujarnya, adalah pengunci tugas manusia yang dilakukan di muka bumi, bukan alam semesta.

"Kalau istilah bahasa Jawa, ini [perubahan nama dari Buwono menjadi Bawono] *kabotan jengng* [tanggung jawab terhadap nama yang disandang terlalu berat]," tuturnya.

Adapun nama Mangkubumi yang sekarang dipakai GKR Pembayun dalam sejarahnya merupakan nama untuk putra mahkota laki-laki.

Charis mengatakan suksesi Kraton tak hanya masalah internal karena Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari NKRI. "Implikasi politik [dari suksesi] harus diperhitungkan," ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Forum LSM DIY, Beny Susanto, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mencairkan Dana Keistimewaan DIY 2015. Pasalnya, ketennan yang terlapat dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan didasarkan atas asal-usul dan paugeran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak HB I sampai dengan HB IX.

"Penanggung jawab anggaran adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan bukan Sultan Hamengku Buwono X," ujar dia.

Terpisah, cucu dari HB VIII, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Jatiningrat yang menjabat sebagai Pengageng Tepas Dworo Puro (semacam pejabat hubungan masyarakat) Kraton Ngayogyakarta, mengungkapkan perjanjian HB X sebelum jumenengan (naik takhta).

Menurut KRT Jatiningrat, ada lima perjanjian Sultan kepada HB IX sesaat sebelum diangkat menjadi HB X (*lihat grafis*).

"Janji ini diucapkan Sultan sebelum jumenengan kepada almarhum HB IX," kata KRT Jatiningrat saat ditemui di ruang kerjanya di kompleks Kraton, Sabtu (9/5).

la pun mengharapkan Sultan tetap berpegang teguh pada paugeran Kraton. Pria yang akrab disapa Romo Tirun ini mengaku tidak

• Lebih Lengkap Halaman 7

• Lebih Lengkap Halaman 7

Buwono Terkunci Keistimewaan

JOGJA—Perubahan nama Sri Sultan HB X rupanya tak cukup hanya melalui Sabda Raja.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harjanyoga.com

▶ Selama belum ada legalitas formal perubahan nama sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia, DPRD DIY tetap memakai nama Sri Sultan Hamengku Buwono.

▶ Sultan-sultan terdahulu menunjuk penggantinya selalu berdasar wangsit leluhur.

Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Arief Noor Hartanto, menyatakan nama dan gelar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sudah terkunci dalam Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK), yakni dalam Pasal 1 yang mengatur Keistimewaan Umum. Perawatan nama Sultan dari

Bayern Pantang Kibarkan Bendera Putih

Hanifah Kusumastuti
redaksi@ibnews.co

MUNICH—FC Bayern menghadapi misi sulit untuk lolos ke final Liga Champions 2014/2015 setelah tumbang 0-3 pada leg pertama semifinal di markas Barcelona.

Tim asal Bavaria tersebut membutuhkan kejutan untuk

ketika bergantian menjamu Barcelona pada leg kedua di Fussball Arena, Munich, Rabu (13/5) pukul 01.45 WIB.

Bayern berada di bibir jurang tersingkir dari Liga Champions setelah jawang Ma n u e l

kali dikoyak gol indah Lionel Messi dan satu kali dibobol Neymar di Camp Nou, Kamis (7/5) WIB lalu. Sejarah membuktikan, belum pernah ada tim yang mampu membalikkan ketertinggalan tiga gol pada sebuah pertandingan semifinal di Eropa.



Buwono Terkunci...

Inung menambahkan hingga Senin siang, DPRD DIY belum menerima tembusan perubahan nama dan gelar Gubernur DIY. Setelah ada surat pemberitahuan, DPRD DIY akan berkoordinasi dengan Pemerintah DIY untuk membahas perubahan gelar Sultan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan dirinya mendapat informasi dalam waktu dekat ada tim pemantau Otonomi Daerah Khusus dari DPR RI yang akan datang ke DIY. "Memantau semuanya, termasuk persoalan ini [polemik internal Kraton]," kata Inung.

Menurut Inung, persoalan di internal Kraton menyusul dikeluarkannya Sabda Raja dan Dawuh Raja tidak bisa dikatakan sebagai persoalan internal keluarga Kerajaan saja. Setelah adanya UUK DIY, sejak itu pula negara sudah mengintervensi wilayah Kraton, mengatur siapa calon gubernur dan sebagainya. Penyebabnya, UUK menyatakan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus menjabat sebagai Gubernur DIY.

"Sehingga masyarakat berhak tahu siapa calon Gubernur DIY," kata Inung.

Sebelumnya, Pengageng Tepas Dworo Puro (semacam pejabat hubungan masyarakat) Kraton, Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, menyatakan administrasi Kraton sejauh ini masih menggunakan nama Sri Sultan Hamengku Buwono.

Menurut dia, selama belum ada kekuatan hukum dari undang-undang, nama Bawono belum dipakai.

Terpisah, salah satu adik HB X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat, mempersilakan masyarakat Jogja yang tidak setuju dengan Sabda Raja dan Dawuh Raja untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka.

"Silakan saja warga Jogja dan warga luar Jogja berdemo, asal jangan sampai merusak Kraton," kata dia melalui ponsel.

Kemarin siang, Gusti Yudha mengaku kedatangan sejumlah warga Kauman, Jogja yang menyatakan tidak sepakat dengan keputusan HB X yang mengeluarkan Sabda Raja. Mereka berniat untuk berunjuk rasa.

"Kalau sampai merusak Kraton akan berhadapan dengan saya," ujar adik tiri Sultan HB X ini. Sebagian warga Kauman memang sudah terang-terangan menolak penggantian gelar Kalifatullah, dan pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, yang disebut-sebut bakal menjadi penerus takhta Kraton.

Sejumlah spanduk bertuliskan, "Kembalikan Pugeran, Jogja Tetap Istimewa" juga ditulis atas nama warga Kauman. Sementara itu, Gusti Yudha termasuk kerabat Sultan yang keberatan dengan Sabda Raja dan Dawuh Raja.

Sulit Dibantah

Sebelumnya, pakar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana, menilai penjelasan Sultan mengenai alasan di balik Sabda Raja menjadi respons atas sikap adik-adiknya. "Politik simbol direspons secara simbolik juga," kata Margana.

Dia menjelaskan, sebelumnya, para adik-adik Sultan, yang kecewa dengan isi Sabda Raja, menyatakan penolakan dengan berziarah ke makam leluhurnya di Imogiri dan Kotagede. Ziarah itu sekaligus untuk meminta maaf ke para arwah raja-raja Mataram Islam atas keputusan Sultan mengeluarkan Sabda Raja.

"Ini protes dengan bahasa politik simbolik," kata dia.

Sultan kemudian meresponsnya dengan cara simbolik juga. Menurut Margana, fakta ini terlihat dari alasan Sultan, yang mengeluarkan Sabda Raja karena menerima bisikan para leluhurnya. "Politik di kerajaan Jawa selalu penuh dengan simbol seperti ini," kata Margana.

Bahasa politik simbolik, yang diungkapkan oleh Sultan mengenai Sabda Raja, juga sulit dibantah karena sesuai dengan pola sejarah tradisi suksesi di Kraton Ngayogyakarta dan Mataram Islam.

Margana mencontohkan legitimasi utama pengangkatan para raja di Kraton ialah wahyu Tuhan lewat bisikan arwah raja-raja terdahulu.

"Sultan-sultan terdahulu menunjuk penggantinya atau mengeluarkan keputusan besar juga selalu berdasar wangsit leluhur," kata dia.

Margana mencontohkan, buku *Takhta untuk Rakyat* karya Sultan Hamengku Buwono IX menyebutkan kasus serupa. Setelah ditunjuk oleh Sultan Hamengku Buwono VIII sebagai raja baru, Sultan Hamengku Buwono IX lama sekali tidak menekan kontrak dengan pemerintah kolonial. "Padahal, ini jadi kewajiban setiap Sultan Kraton Ngayogyakarta saat itu," kata Margana.

Sultan Hamengku Buwono IX menulis dia akhirnya juga menekan kontrak dengan kolonial. Alasannya, ada bisikan dari leluhurnya agar menekan kontrak dengan pemerintah Belanda. "Sultan HB IX disuruh teken saja, karena Belanda tak lama lagi keluar dari Jawa. Benar juga, setelah itu, Jepang datang," kata Margana.

Sebelumnya, HB X juga menegaskan perubahan yang dia usung melalui Sabda Raja dan Dawuh Raja tak akan memengaruhi Keistimewaan DIY, termasuk pencairan Dana Keistimewaan. (JIBI/tempo.co)

menyatakan nama dan gelar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sudah terkunci dalam Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK), yakni dalam Pasal 1 yang mengatur Ketentuan Umum. Pergantian nama Sultan dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono membutuhkan legitimasi melalui perubahan Undang-undang (UU) No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

“ Silakan saja warga Jogja dan warga luar Jogja berdemo, asal jangan sampai merusak Kraton.



GBPH
Yudhaningrat

Inung, sapaan akrab Arif Noor Hartanto, mengatakan nama dan gelar itu pula yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) Presiden dalam pelantikan Gubernur DIY Oktober 2012 silam. Oleh karena itu, selama belum ada legalitas formal perubahan nama sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia, DPRD DIY masih tetap menggunakan nama Sri Sultan Hamengku Buwono, bukan Sri Sultan Hamengku Bawono. “Karena nama itu sudah terkunci dalam Undang-undang Keistimewaan,” kata Inung di DPRD DIY, Senin (11/5)

Sultan sudah mengganti namanya melalui Sabda Raja pada Kamis (30/4) lalu. Dalam Sabda Raja itu, Sultan mengganti kata Buwono menjadi Bawono. Selain itu, Sultan juga menghilangkan gelar Kalifatullah. Sultan menyatakan, Kraton segera menyampaikan perubahan nama dan gelar tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Otomatis pemberitahuan ke DPRD dan Pemerintah DIY,” kata Sultan beberapa waktu lalu.

● Lebih Lengkap Halaman 7

Sabda Raja Tak Bisa Batal

JOGJA—Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X, menyatakan Sabda Raja dan Dawuh Raja tak bisa dibatalkan demi hukum.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harajogja.com

Menurut HB X, tak ada aturan hukum yang dilanggar dalam kedua sabda yang dia keluarkan tersebut. "Batal demi hukum" *Hadram eradi* [hukum yang mata]. Ini kan aturan Kraton, bukan aturan konstitusi Republik [Negara Kesatuan Republik Indonesia], kata Sultan di Kepatihan, Selasa (12/5). "Sultan itu kan mutlak," ujar dia. Sebelumnya, sejumlah rayi dalam

► Sultan menyatakan aturan Kraton berbeda dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

► GBPH Yudhaningrat menyatakan dinasti HB X akan habis apabila perempuan menjadi raja.

(adik-adik Sultan), menolak Sabda Raja dan Dawuh Raja. Salah satu adik Sultan, GBPH Yudhaningrat, dalam beberapa kesempatan menolak penggantian gelar putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, yang kemungkinan bakal menjadi penerus takhta Kraton. Gusti Yudha, sapaan akrab Yudhaningrat, menilai Sabda

Raja dan Dawuh Raja cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan adat dan paugeran Kraton.

"Baratnya kereta sudah keluar dari rel yang sudah ada," ujarnya, Sabtu (9/5) lalu.

Yudhaningrat menjelaskan, dinasti HB X akan mati lantaran keraton tak lagi meneruskan kekhalfahan, yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. Jika perempuan menjadi raja, mahzabnya akan ikut suami. Leluhur Kraton mulai dinasti HB X akan hilang dan digantikan dengan mahzab Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro yang merupakan suami Pembayun.

● Lebih Lengkap Hariman 7



Sabda Raja...

"Yang jadi *panceranya* [keturunan] ya, leluhurnya Wironegoro. Kami enggak tahu leluhurnya seperti apa. Itu kekhawatiran mendalam," kata Yudhaningrat.

Beberapa waktu lalu, GBPH Yudhaningrat juga mengklaim 11 rayi dalam sudah menyiapkan jawaban penolakan atas Sabda Raja dan Dawuh Raja. Pernyataan GBPH Yudhaningrat ini dibenarkan oleh GBPH Prabukusumo. Kedua adik Sultan ini menyatakan sudah mempercayakan kepada KGPB Hadiwinoto, adik tertua Sultan untuk menyampaikan jawaban atas Sabda Raja kepada Sultan.

Sementara itu, HB X berniat melaporkan salah satu media *online* lokal Jogja ke Dewan Pers. Sultan menilai media itu telah berbohong dalam memberitakan

Sabda Raja dan Dawuh Raja, sehingga mencemarkan nama baiknya.

Sultan tidak bersedia menyebutkan identitas salah satu media lokal yang dia maksud. "Ada media *online* yang bohong, keluaran pernyataan tidak konfirmasi dengan saya," kata Sultan, Selasa.

Isi berita yang dia permasalahan adalah pertemuannya dengan adik-adiknya. Sultan membantah telah bertemu dengan salah satu adiknya, GBPH Prabukusumo. Sementara dalam berita itu, menurut Sultan, disebutkan GBPH Prabukusumo sudah bertemu dengan Sultan.

Raja yang memiliki nama asli Bendoro Raden Mas (BRM) Herjuno Darpo ini mengakui memang sudah bertemu dengan

adik-adiknya yang tinggal di Jakarta. Namun, ia mengaku belum pernah bertemu dengan adik-adiknya yang di Jogja pasca-keluhurnya Sabda Raja.

"Terpisah, Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Jogja, Jaddul Maulana, keberatan karena Sultan membawa-bawa nama leluhur dan Tuhan menyangkut persoalan Sabda Raja.

Menurutnya, persoalan paugeran dan pergantian kekuasaan tak seharusnya dikaitkan dengan hal-hal magis dan spiritual seperti mendapat wahyu dan bisikan. "Ini persoalan sosiologis yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai historis dan diantut masyarakat," ujarnya.

Ketua Dewan Penasihat Paguyuban Dukuh Gunungkidul Janaloka,

Sutyono, menyatakan alasan Sultan mengeluarkan sabda atas dasar wahyu tak bisa diterima akal sehat. Menurut Sutyono, wahyu hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. "Raja adalah jabatan politik dan adat," ucapnya.

Adapun, pakar politik dan pemerintahan dari Fispol UGM, Bayu Dardais, menyatakan perintah Tuhan adalah legitimasi yang lumrah dalam sejarah kerajaan di Indonesia.

"Dalam prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Palembang yang dibangun Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 masehi mengisahkan tentang kutukan-kutukan yang akan diterima bagi mereka yang membangkang atau memberontak kepada kerajaan. Hal itu terus menerus digunakan untuk

membangun legitimasi," ujar dia saat menjawab beberapa pertanyaan mengenai Sabda Raja dan Dawuh raja lewat surat elektronik (surel).

Bisikan leluhur juga sudah sering digunakan di Kraton Ngayogyakarta untuk melegitimasi tindakan politik tertentu. Pakar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana, mengatakan bahasa simbolik lewat perintah Tuhan atau bisikan leluhur sesuai dengan pola sejarah tradisi suksesi di Kraton Ngayogyakarta dan Mataram Islam.

Margana mencontohkan legitimasi utama pengangkatan para raja di Kraton ialah wahyu Tuhan lewat bisikan arwah raja-raja terdahulu.

JOGJA—Para rayi dalem atau adik-adik Sultan HB X masih menunggu tanggapan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk musyawarah bersama mengakhiri polemik Sabda Raja dan Dawuh Raja.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Rayi dalem sudah merespons dua sabda yang dikeluarkan HB X beberapa waktu lalu tersebut. “Mangga [Silakan] Ngarso Dalem menanggapi bagaimana,” kata salah satu adik HB X yang tinggal di Jakarta, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Suryodiningrat, saat dihubungi melalui ponsel, Kamis (14/5) sore.

GBPH Suryodiningrat mengaku polemik yang terjadi di internal keluarga Kraton bisa berdampak pada abdi dalem, dan masyarakat Jogja pada umumnya. Para rayi

dalem yang tinggal di Jakarta akan kembali merapat ke Jogja jika Sultan mengundangnya. “Kami menunggu, kalau diundang ke Jogja lagi,” kata Suryodiningrat.

Adik Sultan HB X lainnya, GBPH Yudhaningrat, juga mengatakan pendapat senada. Gusti Yudha, sapaan akrabnya mengaku tidak ingin terus beradu pendapat. Ia menginginkan adanya musyawarah keluarga. “Musyawarah lebih enak dari pada terus *atos-atosan* [saling bersikeras],” katanya.

Menurut Gusti Yudha, para rayi dalem memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kewibawaan Kraton. GBPH Prabukusumo juga mengatakan adik-adik Sultan masih menunggu perkembangan menyangkut polemik dua sabda HB X. Menurutnya perbedaan pendapat soal Sabda Raja dan Dawuh Raja belum bisa diakhiri.

Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Muhammad Shodik mengatakan polemik Sabda Raja dan Dawuh Raja sebenarnya persoalan internal Kraton, namun bisa berdampak pada masyarakat.

● Lebih Lengkap Halaman 7

Kasultanan Menunggu...

Sebab, menurut Shodik, Sultan bukan hanya menjadi simbol keluarga Kraton, melainkan juga menjadi simbol masyarakat, bahkan simbol nasional. Akibatnya, keputusan Sultan akan menjadi perhatian banyak orang.

Shodik menilai Sultan ingin melakukan perubahan yang besar atau reformasi kultural, menyesuaikan dengan konteks zaman dengan membawa isu demokrasi dan kesetaraan gender.

Namun isu itu akan menimbulkan kecurigaan jika dilakukan dengan cara komunikasi sepihak. “Maka musyawarah keluarga perlu dikuatkan,” kata Shodik.

Menurut Shodik, jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik yang terjadi di internal Kraton adalah

musyawarah semua kerabat Kraton. Sebab, jika tidak, tak menutup kemungkinan pertentangan di Kraton akan dimanfaatkan oleh pihak luar yang memiliki kepentingan.

Sebelumnya, enam adik Sultan HB X yang tinggal di Jakarta menyatakan tidak akan mengakui adanya putri mahkota maupun sultan perempuan dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pernyataan itu disampaikan oleh GBPH Pakuningrat, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5). Tanggapan GBPH Pakuningrat ini juga mengatasmakan enam pangeran yang selama ini tinggal di Jakarta, yakni GBPH Cakraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryonegoro, GBPH Hadinegoro,

dan GBPH Suryonegoro. Mereka merupakan para putra HB IX dari satu ibu Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Ciptomurti. Ada tiga poin pernyataan para rayi dalem.

Pertama, penyelesaian polemik dilakukan di internal, dengan mengajak semua putra HB IX untuk bermusyawarah tanpa konflik, dan tetap menggunakan akal sehat serta kepala dingin.

Kedua, hanya mengakui Sri Sultan Hamengku Buwono X dan tidak mengakui Sri Sultan Hamengku Bawono X, karena yang bertakhta di Kraton adalah Sri Sultan Hamengku Buwono, sehingga gelar tidak dapat diubah.

Ketiga, tidak akan mengakui adanya putri mahkota maupun Sultan perempuan. Dalam hukum

adat, keturunan darah dalem hanya dari pihak laki-laki. Apabila tetap dilakukan, kelanjutan Kesultanan akan terputus, karena sang penerus bukan lagi darah dalem,” kata GBPH Pakuningrat.

Keenam rayi dalem ini juga sempat menemui Sultan di Kraton Kilen, pada Kamis (7/5) sore atau sehari sebelum Sultan memberikan penjelasan dua sabdanya kepada masyarakat dan media massa di rumah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun yang kini bergelar GKR Mangkubumi.

Sultan mengeluarkan Sabda Raja pada Kamis (30/4) lalu. Lima hari kemudian, Sultan mengeluarkan Dawuh Raja, Selasa (5/5). Perintah ini mengukuhkan nama putri sulungnya GKR Pembayun menjadi

GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram.

Sultan merasa tidak ada hukum yang dia langgar dalam kedua sabda yang dikeluarkannya. “Ini aturan Kraton, bukan aturan konstitusi republik [Negara Kesatuan Republik Indonesia]. Sultan itu kan mutlak,” tegasnya.

Sultan juga sudah mengundang adik-adiknya yang tinggal di Jogja untuk menghadiri pembacaan Sabda Raja dan Dawuh Raja. Namun, mereka tidak datang.

Rabu siang, Sultan mengatakan draf Sabda Raja belum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia masih akan mengecek terlebih dahulu kata-kata sabdanya.

Bintang Jasa...